



L K I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI

KATA PENGANTAR

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Dibuat di Jambi
Pada tanggal Januari 2022



IKHTISAR LAPORAN

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2021 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 dengan total jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 19 Indikator dari 5 Sasaran Kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2021, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi telah melaksanakan dengan baik, 0 (nol) Indikator Kinerja kurang dari 100% ($0\% \leq IK < 100\%$), dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama yang lebih besar atau sama dengan 100% ($\geq 100\%$).

Hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran yaitu sebesar 100%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
• Bagan Struktur Organisasi	6
I.3 Sumber Daya Manusia	7
I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	8
I.5 Sistematika Laporan	10
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	15
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	19
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	32
III.2 Pengukuran Capaian Kinerja	33
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	37
IKK 1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	37
IKK 2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	39
IKK 3 Jumlah Terminal Tipe A & Terminal Barang yang beroperasi	40
IKK 4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	41
IKK 5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	42
IKK 6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	43
SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	44
IKK 7 Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A	45
IKK 8 Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	46
IKK 9 Persentase pelaksanaan SPM di pelabuhan SDP	46
SK 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	47
IKK 10 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi sosial	48
IKK 11 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	49
IKK 12 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, Rass, dan batas kecepatan di jalan nasional	50
IKK 13 Jumlah ketersediaan taman edukasi	51
IKK 14 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	52
IKK 15 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	53
IKK 16 Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	53
IKK 17 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	52



SK 4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	55
IKK 18	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.....	55
SK 5	Meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat dan akuntabel	57
IKK 19	Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat.....	57
III.3	Realisasi Anggaran	58
III.3.1	Alokasi Anggaran Tahun 2021	58
	Pagu Anggaran	58
	Rincian Per Sumber Dana Tahun 2021	58
	Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2021	58
	Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran	
	Refocusing Anggaran Tahun 2021	60
	Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2021.....	60
	Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2021	60
	Rincian Realokasi Per Sumber Dana & Per Jenis Belanja Tahun 2021	61
	Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021	62
	Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 – 2021	63
III.3.2	Realisasi Anggaran Tahun 2021	64
	Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021	64
	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021	65
	Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2021	66
	Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja.....	67
III.3.5	Hambatan dan Kendala.....	69

BAB IV PENUTUP

IV	Penutup	72
----	---------------	----

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

LAMPIRAN VI

LAMPIRAN VII

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Rencana Aksi Tahun 2021

Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2021

Revisi Rencana Aksi I Tahun 2021

Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2021

Lain – lain yang dianggap perlu



I.1 **LATAR BELAKANG**

I. 1. Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

I. 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe B mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPTD Tipe B menyelenggarakan fungsi :

- 1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;**
- 2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;**
- 3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas,**



pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;

- 4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial;**
- 5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat;**
- 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.**

Balai Pengelola Transportasi Darat Terdiri atas:

- 1. Subbagian Tata Usaha**

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

- 2. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan**

Mempunyai tugas melakukan Melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional, pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.

3. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mempunyai tugas Melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, Pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan /atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengawasan tarif angkutan jalan.

4. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis

Mempunyai tugas Melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

5. Kelompok jabatan fungsional

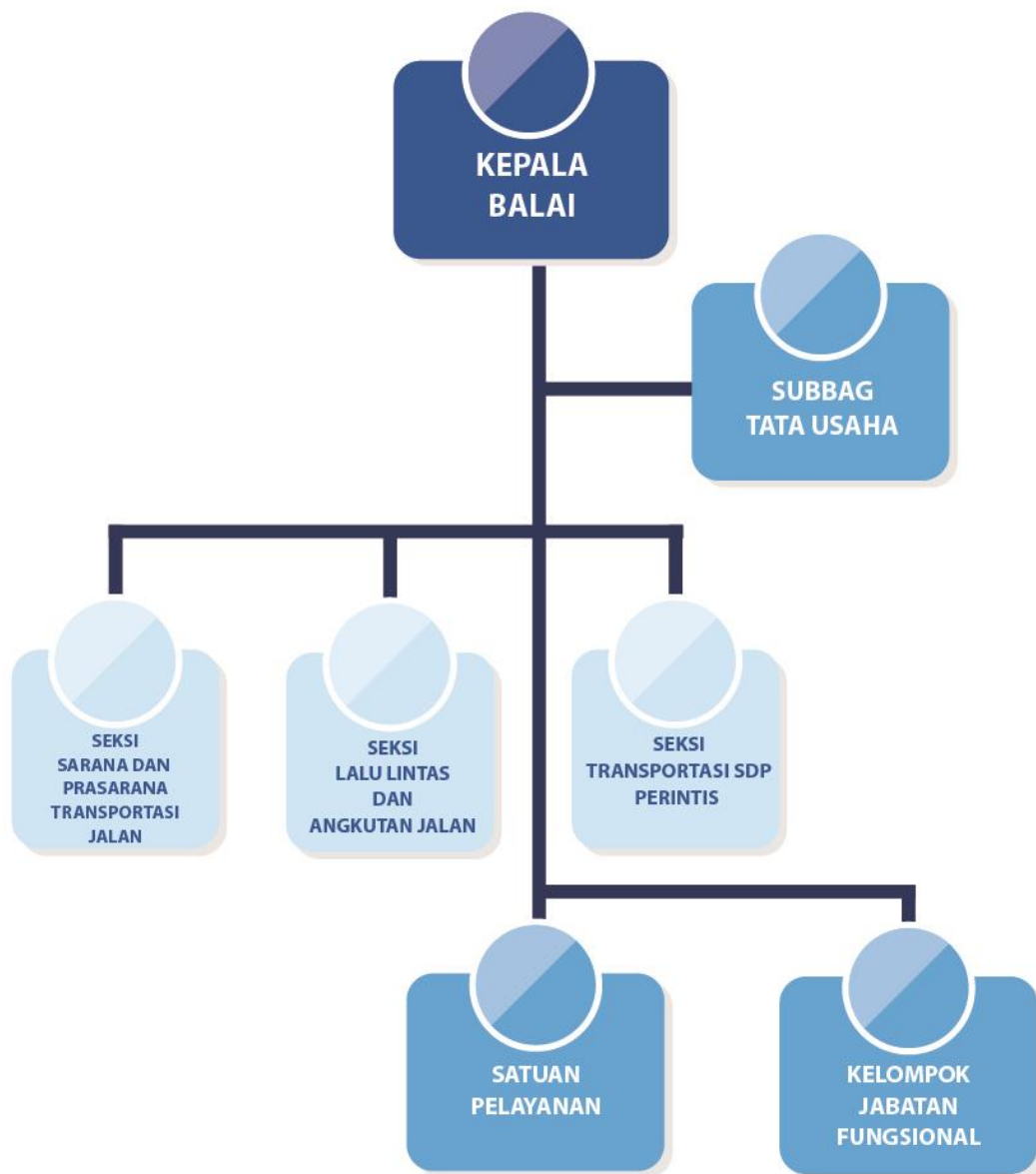


Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kerangka Kelembagaan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BPTD TIPE B



Bagan Struktur Organisasi BPTD Tipe B

I. 3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai di BPTD Wilayah V Provinsi Jambi adalah sebanyak 312 orang dengan rincian 137 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 175 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :

UNIT KERJA	JUMLAH		TOTAL
	PNS	PPNPN	
KANTOR INDUK BPTD	33	35	68
TERMINAL TIPE A ALAM BARAJO KOTA JAMBI	10	33	43
TERMINAL TIPE A SAROLANGUN	12	15	27
TERMINAL TIPE A BANGKO	12	20	32
TERMINAL TIPE A BUNGO	16	18	34
UPPKB JAMBI MERLUNG	14	25	39
UPPKB PELAWAN SAROLANGUN	9	11	20
UPPKB MUARA TEMBESI	26	12	38
UPPKB KERINCI KOTA SUNGAI PENUH		1	1
PELABUHAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN KUALA TUNGKAL	5	5	10
JUMLAH	137	175	312

Tabel I. 1 Sumber Daya Manusia BPTD Wilayah V Provinsi Jambi

I. 4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.4.1. Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) *Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009*
Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

I.4.2. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai di Lingkungan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi.

Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2018, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan terdapat 9 satuan pelayanan yaitu Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Alam Barajo, Terminal Tipe A Sribulan Sarolangun, Terminal Tipe A Pulau Tujuh Bangko, Terminal Tipe A Bungo, UPPKB Jambi Merlung, UPPKB Tembesi, UPPKB Pelawan Sarolangun, UPPKB Sungai Penuh, Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal

I.4.3. Anggaran



Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga BPTD Wilayah V Provinsi Jambi hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

I.4.4. Isu Strategis

Isu Strategis BPTD Wilayah V Provinsi Jambi adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
3. Pengoperasian Terminal Penumpang;
4. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
5. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
6. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
7. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
10. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB.

I.4.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Tahun 2021 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Kegiatan
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I. 5. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021
- II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2021
 - Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2021
 - Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- III.2 Pengukuran Capaian Kinerja
 - A. SK 1
 - Uraian Sasaran Kegiatan
 - A.1. IKK 1
 - A.1.1. Definisi Indikator Kinerja
 - A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
 - A.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - A.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - A.2. IKK 2
 - A.2.1. Definisi Indikator Kinerja
 - A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
 - A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - A.3. IKK 3
 - A.2.1. Definisi Indikator Kinerja
 - A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
 - A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - A.4. IKK 4
 - A.2.1. Definisi Indikator Kinerja



- A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.5. IKK 5

- A.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.6. IKK 6

- A.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

B. SK2

- Uraian Sasaran Kegiatan

B.1. IKK 7

- B.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- B.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

B.2. IKK 8

- B.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- B.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

B.3. IKK 9

- B.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- B.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C. SK3

- Uraian Sasaran Kegiatan

C.1. IKK 10

- C.1.1. Definisi Indikator Kinerja

- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.2. IKK 11

- C.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.3. IKK 12

- C.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.4. IKK 13

- C.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.5. IKK 14

- C.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.6. IKK 15

- C.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.7. IKK 16

- C.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang



C.8. IKK 17

- C.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

D. SK4

- Uraian Sasaran Kegiatan

C.1. IKK 18.....

- C.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

E. SK5

- Uraian Sasaran Kegiatan

C.1. IKK 19

- C.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

III.3 Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2021

- Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2021
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2021
- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- Refocusing Anggaran Tahun 2021
- Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2021
- Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2021
- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2021
- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021
- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 - 2021

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2021

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2021
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

III.3.3. Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup

IV.1.1 Ringkasan Capaian

IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021;
3. Rencana Aksi Tahun 2021;
4. Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2021;
5. Revisi Rencana Aksi I Tahun 2021;
6. Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2021;
7. Lain – lain yang dianggap perlu.

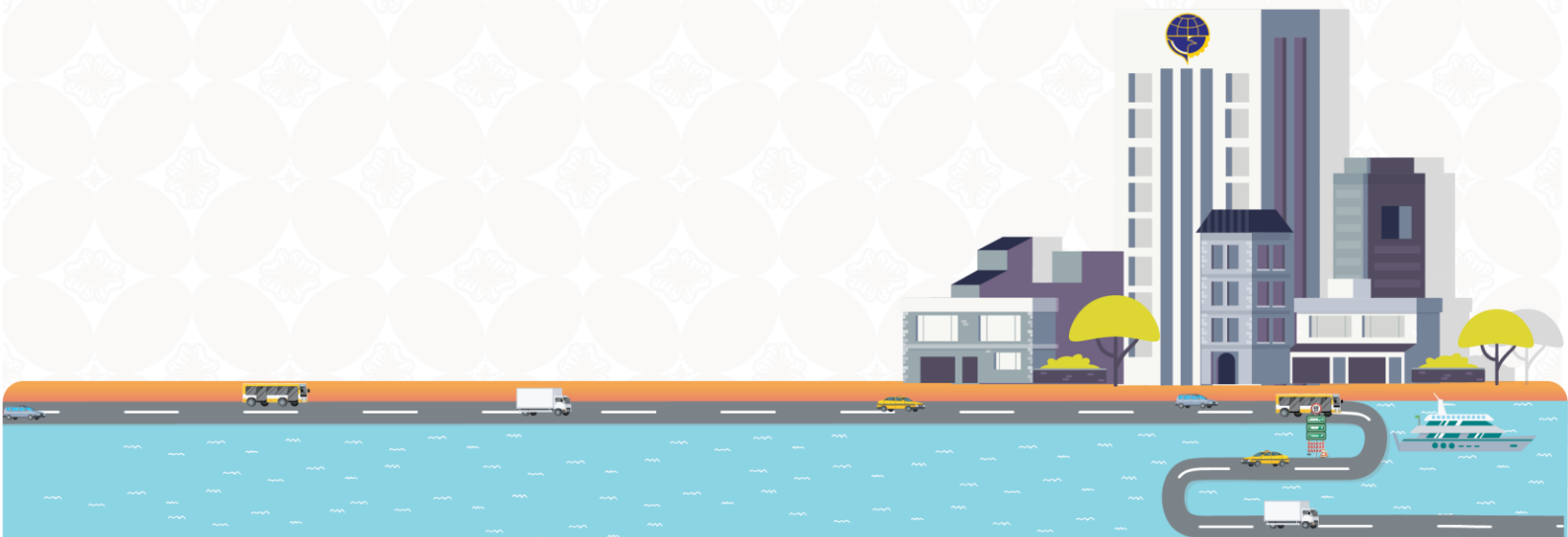


II.1

URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Draft Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.



Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi 2020-2024 sesuai Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	1. Presentase pelaksanaan pelayanan keperintisan jalan	Persen	100
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	5
		3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4
		4. Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan	Persen	100



		angkutan penyeberangan		
		6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	7. Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A	Persen	100
		8. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-
		9. Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP	Persen	100
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70
		11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Persen	2
		12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	38
		13. Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		14. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750

		15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-
		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	50
		17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Unit	50
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5.	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2021 terdiri atas 5 sasaran kegiatan yaitu :

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi.
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat.
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat.
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.
5. Meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat dan akuntabel.

Sasaran kegiatan pertama yaitu meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi terdiri atas 6 (enam) Indikator kinerja yaitu :

1. Presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda



3. Jumlah terminal tipe a dan terminal barang yang beroperasi
4. Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda
5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan
6. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

Sasaran kinerja kedua yaitu Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A
2. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A
3. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP

Sasaran kinerja ketiga yaitu meningkatnya keselamatan transportasi darat terdiri atas 8 (delapan) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal
2. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen perhubungan darat
3. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, Rass, dan batas kecepatan di jalan nasional
4. Jumlah ketersediaan taman edukasi
5. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
6. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)
7. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor
8. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP

Sasaran kinerja keempat yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri atas indikator kinerja yaitu kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

Sasaran kinerja kelima yaitu meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat dan akuntabel terdiri atas indikator kinerja yaitu tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat.

II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2021 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi melalui Program

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 129.371.473.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II.2Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2021





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BAHAR, ST, MT

Jabatan : KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
NRP. 6205 0784

Jakarta, Januari 2021
Pihak Pertama,

BAHAR, ST, MT
Pembina Tk. I – (IV/b)
NIP. 19711007 199803 1 008

-2-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

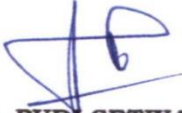
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	1. Presentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan	Persen	100
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	5
		3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4
		4. Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		5. Presentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Persen	100
		6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	7. Presentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A	Persen	100
		8. Presentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-
		9. Presentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP	Persen	100
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	10. Presentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70
		11. Presentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Persen	2
		12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan di jalan nasional	Lokasi	38
		13. Jumlah ketersediaan taman edukasi	Lokasi	-



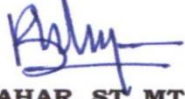
		14. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750
		15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-
		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	50
		17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Unit	50
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5.	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat yang akuntabel	19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

	Kegiatan	Anggaran
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 43.722.358.000,-
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 13.549.148.000,-
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 44.960.167.000,-
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 2.768.515.000,-
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 7.803.784.000,-
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 16.567.501.000,-

Pihak Kedua,


Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
 NRP. 6205 0784

 Jakarta, Januari 2021
 Pihak Pertama,


BAHAR, ST, MT
 Pembina Tk. I – (IV/b)
 NIP. 19711007 199803 1 008

Pada bulan Agustus Tahun 2021 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja kepala BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan adanya refocusing/penghematan anggaran pada DIPA Satuan Kerja BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dan juga adanya perubahan nomenklatur sasaran program / kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang harus menyesuaikan dengan Rencana Strategis BPTD Wilayah V Provinsi Jambi tahun 2020-2024.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran BPTD Wilayah V Provinsi Jambi total anggarannya menjadi Rp. 96.215.898.000 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 3 Tabel Revisi Perjanjian Kinerja I Tahunan Tahun 2021





REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BAHAR, ST, MT

Jabatan : KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. Budi Setiyadi, SH, M.Si
NRP. 6205 0784

Jakarta, Agustus 2021
Pihak Pertama,

Bahar, ST, MT
Pembina Tk. I – (IV/b)
NIP. 19711007 199803 1 008

-2-

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	1. Presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	Persen	100
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	5
		3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4
		4. Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Persen	100
		6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	7. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	Persen	80
		8. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-
		9. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Persen	100
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70
		11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Persen	2
		12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	38



		13. Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		14. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750
		15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-
		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	60
		17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Unit	-
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5.	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Kegiatan**Anggaran**

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat | Rp. 27.722.258.000,- |
| 2. | Pelayanan Transportasi Darat | Rp. 13.528.139.000,- |
| 3. | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat | Rp. 29.118.701.000,- |
| 4. | Penunjang Teknis Transportasi Darat | Rp. 2.275.515.000,- |
| 5. | Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp. 7.703.784.000,- |
| 6. | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat | Rp. 15.867.501.000,- |

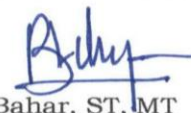
Disetujui

Jakarta, Agustus 2021

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi,

Drs. Budi Setiyadi, SH, M.Si
 NRP. 6203.0784


Bahar, ST, MT
 Pembina Tk. I – (IV/b)
 NIP. 19711007 199803 1 008

Pada bulan desember Tahun 2021 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja kepala BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan adanya penambahan anggaran pada DIPA Satuan Kerja BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dan juga adanya perubahan nomenklatur sasaran program / kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang harus menyesuaikan dengan Rencana Strategis BPTD Wilayah V Provinsi Jambi tahun 2020-2024.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran BPTD Wilayah V Provinsi Jambi total anggarannya menjadi Rp. 99.765.868.000 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 4 Tabel Revisi Perjanjian Kinerja II Tahunan Tahun 2021



- 1 -



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **BAHAR, ST, MT**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**
WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

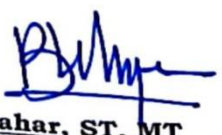
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2021
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


Drs. Budi Setiyadi, SH, M.Si


Bahar, ST, MT
Pembina Tk. I – (IV/b)
NIP. 19711007 199803 1 008

-2-

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	1. Presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	Persen	100
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	5
		3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4
		4. Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Persen	100
		6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	7. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	Persen	80
		8. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-
		9. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Persen	100
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70
		11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Persen	2
		12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	38



-3-

		13. Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		14. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750
		15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-
		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	60
		17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Unit	-
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5.	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Kegiatan**Anggaran**

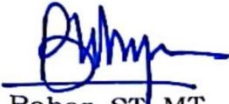
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat | Rp. 25.765.289.000,- |
| 2. Pelayanan Transportasi Darat | Rp. 16.622.939.000,- |
| 3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat | Rp. 31.000.850.000,- |
| 4. Penunjang Teknis Transportasi Darat | Rp. 2.275.515.000,- |
| 5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp. 8.433.774.000,- |
| 6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat | Rp. 15.667.501.000,- |

Disetujui

Jakarta, Desember 2021

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi,

Drs. Budi Setiyadi, SH, M.Si

Bahar, ST, MT
 Pembina Tk. I - (IV/b)
 NIP. 19711007 199803 1 008

Dipindai dengan CamScanner

III.1

TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.



III. 2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:



$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

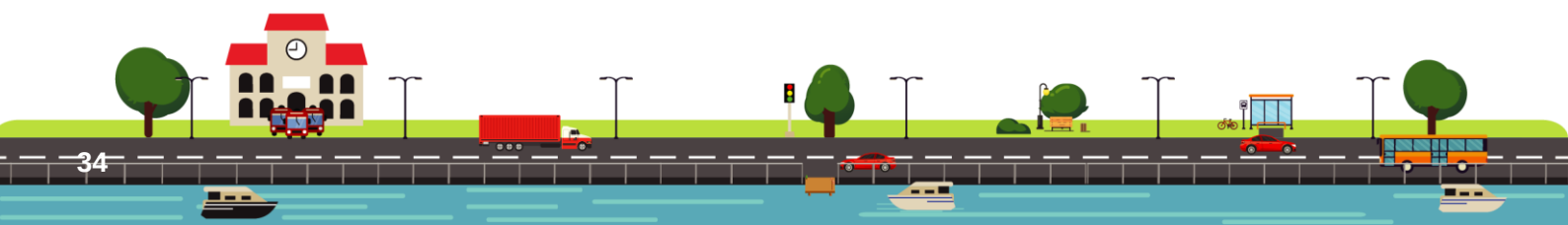
Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2021

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2021 Dalam Draft Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja BPTD Wilayah V Provinsi Jambi, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.



Tabel III. 1 Pengukuran Kinerja BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2021

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi					100%			100%			100%
IKK 1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	Persen	100	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
IKK 2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	5	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%
IKK 3	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
IKK 4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKK 5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Persen	100	100	100	100%	100	100	100%	100	100 %	100%
IKK 6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan transportasi darat					100%			100%			100%
IKK 7	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	Persen	80	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%
IKK 8	Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKK 9	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Persen	100	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
SK3	Meningkatnya keselamatan transportasi darat					60%			60%			100%
IKK 10	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70	70	50	71%	70	50	71%	70	70	100%
IKK 11	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Persen	2	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
IKK 12	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	38	38	10	26%	38	10	26%	38	38	100%
IKK 13	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKK 14	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750	750	20	3%	750	20	3%	750	750	100%
IKK 15	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKK 16	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	50	50	50	100%	50	50	100%	50	50	100%
IKK 17	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SK4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat					100%			100%			100%



IKK 18	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	85	85	100%	85	85	100%	85	85	100%
SK5	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel					100%			100%			100%
IKK 19	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	85	85	100%	85	85	100%	85	85	100%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						85%			85%			100%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						85%			85%			100%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK$\geq$100%)						11			11			14
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%$\leq$IKK<100%)						3			3			0



Selama tahun 2021, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 19 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

BPTD Wilayah V Provinsi Jambi merupakan salah satu balai di bawah direktorat jenderal perhubungan darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh BPTD Wilayah V Provinsi Jambi adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1. Presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
2. IKK 2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda
3. IKK 3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi
4. IKK 4. Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda
5. IKK 5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan
6. IKK 6. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

IKK 1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dihitung berdasarkan jumlah trayek angkutan perintis yang dilayani.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Target Jumlah Trayek}}{\text{Realisasi Jumlah Trayek}}$$

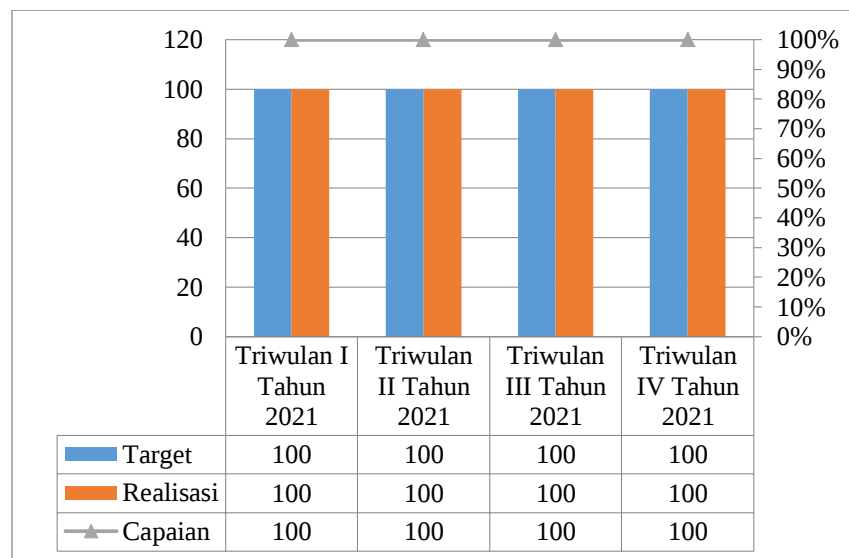


Keterangan:

1. Trayek yang dilayani adalah:
 - a. Sarolangun – Sepintun;
 - b. Sarolangun – Petiduran Baru;
 - c. Terminal Muara Bulian – Jangga Baru;
 - d. Terminal Bangko – Desa Kibul;
 - e. Terminal Bungo – Desa Bangun Seranten;
 - f. Kuala Tungkal – Teluk Nilau – Senyerang;
 - g. Terminal Bangko – Sungai Pinang;
 - h. Terminal Tipe C Rimbo Bujang – Serai Serumpun.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2021

Capaian presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2021 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target PK 2021 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 1. Grafik capaian IKK presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan.



Gambar III 1 Grafik Capaian IKK
presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Kegiatan pada Tahun 2021 adalah subsidi operasional angkutan jalan di Provinsi Jambi yang melayani 8 rute trayek yaitu :

- a. Sarolangun – Sepintun;
- b. Sarolangun – Petiduran Baru;
- c. Terminal Muara Bulian – Jangga Baru;
- d. Terminal Bangko – Desa Kibul;
- e. Terminal Bungo – Desa Bangun Seranten;
- f. Kuala Tungkal – Teluk Nilau – Senyerang;
- g. Terminal Bangko – Sungai Pinang;



h. Terminal Tipe C Rimbo Bujang – Serai Serumpun.

Sehingga:

$$\text{Capaian Presentase pelaksanaan keperintisan} = \frac{8}{8} = 1,0$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1,0}{1,0} \times 100\% = 100\%$$

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan pengawasan secara optima; terhadap pelaksanaan subsidi angkutan perintis di Provinsi Jambi;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota terkait dengan pembukaan rute angkutan perintis yang baru.

IKK 2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda

a.1. Definisi Indikator Kinerja

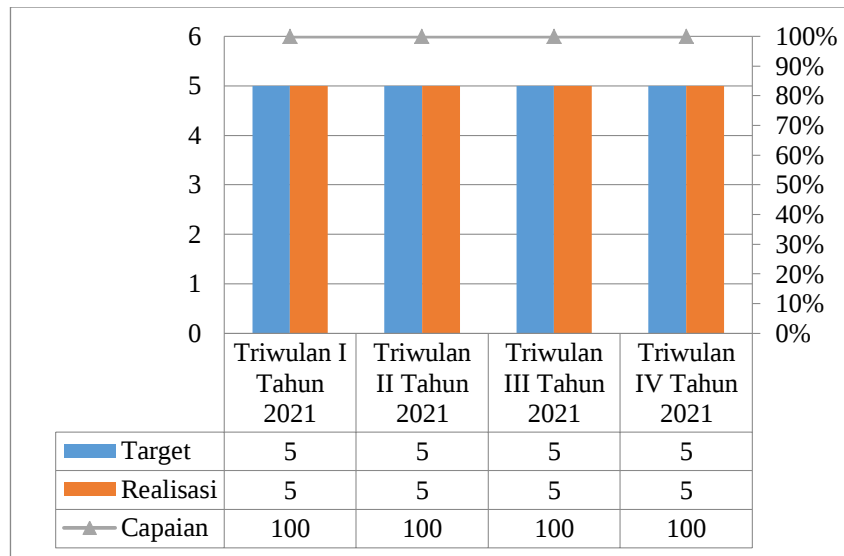
Capaian kinerja Jumlah simpul Transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda dihitung berdasarkan jumlah trayek angkutan perintis yang dilayani.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Capaian presentase pelaksanaan simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda Tahun 2021 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target PK 2021 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 2. Grafik capaian IKK Jumlah simpul Transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPTD V Jambi Tahun 2021



Gambar III 2 Grafik Capaian IKK Jumlah simpul Transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Kegiatannya adalah angkutan perintis yang melayani terminal dan pelabuhan yaitu angkutan perintis dari Bandara Sultan Thaha Jambi ke Terminal Tipe A.

Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah simpul Transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda antara lain dipengaruhi oleh komitmen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

IKK 3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal barang yang beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

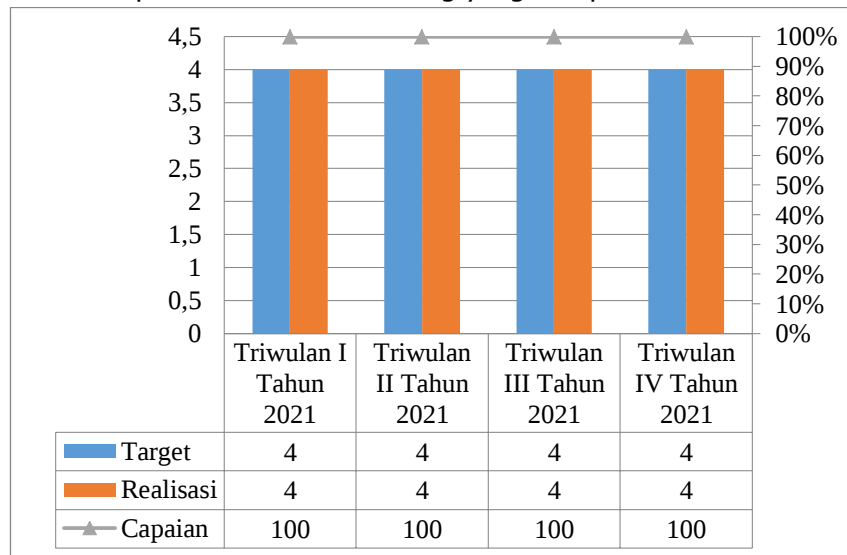
Capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal barang yang beroperasi, Terminal Tipe A yang beroperasi di Provinsi Jambi ada 4 terminal diantaranya adalah:

- Terminal Tipe A Alam Barajo;
- Terminal Tipe A Sribulan Sarolangun;
- Terminal Tipe A Pulau Tujuh Merangin;
- Terminal Tipe A Muara Bungo.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021



Capaian jumlah pelaksanaan Terminal Tipe A dan Terminal barang Tahun 2021 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target PK 2021 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 3. Grafik capaian IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal barang yang beroperasi.



Gambar III 3 Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal barang yang beroperasi

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Kegiatan terminal Tipe A yang beroperasi di jambi ada sebanyak 4 (empat) unit, yaitu :

- Terminal Tipe A Alam Barajo;
- Terminal Tipe A Sribulan Sarolangun;
- Terminal Tipe A Pulau Tujuh Merangin;
- Terminal Tipe A Muara Bungo.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

- Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang;
- Meningkatkan fasilitas para penumpang;
- Melakukan pengawasan secara optimal terhadap keselamatan transportasi jalan.

IKK 4. Jumlah Penyedia Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Untuk capaian kinerja Jumlah Penyedia Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda tidak ada kegiatan pada Tahun 2021.



a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Tidak ada kegiatan pada Tahun 2021

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Tidak ada kegiatan pada Tahun 2021

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Tidak ada kegiatan pada Tahun 2021

IKK 5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

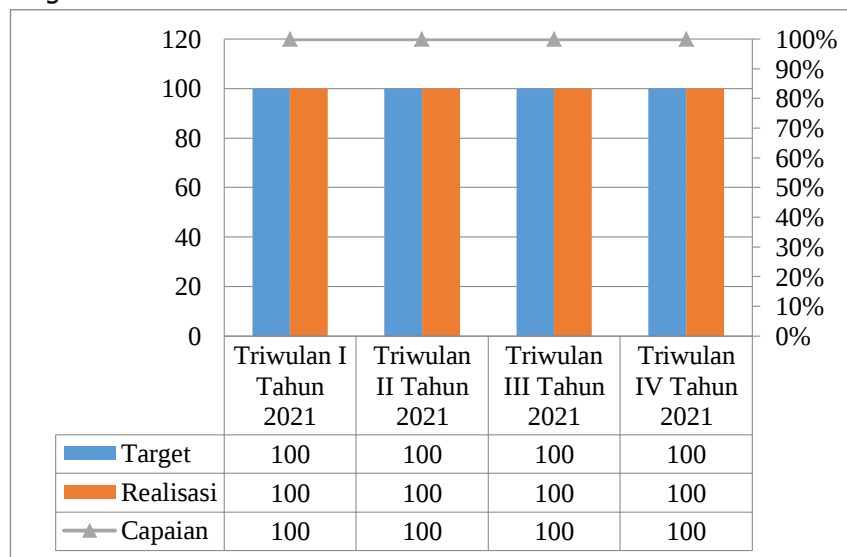
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada indikator persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan ini terdapat di pelabuhan penyeberangan yang ada di kuala tungkal dengan ada 2 rute yang terdapat pengawasan yang bertugas dari BPTD Wilayah V Provinsi jambi yaitu :

1. Kuala Tungkal – Dabo
2. Kuala Tungkal –Telaga Punggur

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Capaian persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2021 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target PK 2021 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 5. Grafik capaian IKK persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan.



Gambar III 4 Grafik Capaian IKK persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan



Pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan di Provinsi Jambi yaitu pelabuhan penyeberangan Kuala Tungkal yang melayani rute :

1. Kuala Tungkal – Dabo
2. Kuala Tungkal – Telaga Punggur

Pada pelabuhan penyeberangan Kuala Tungkal terdapat Satuan Pelayanan Pengawasan dari BPTD V Jambi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelabuhan penyeberangan Kuala Tungkal.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Meningkatkan pengawasan Standar Pelayanan Minimal terhadap fasilitas Dermaga Pelabuhan dan Kapal Penyeberangan;
2. Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang;
3. Meningkatkan pengawasan keselamatan angkutan penyeberangan.

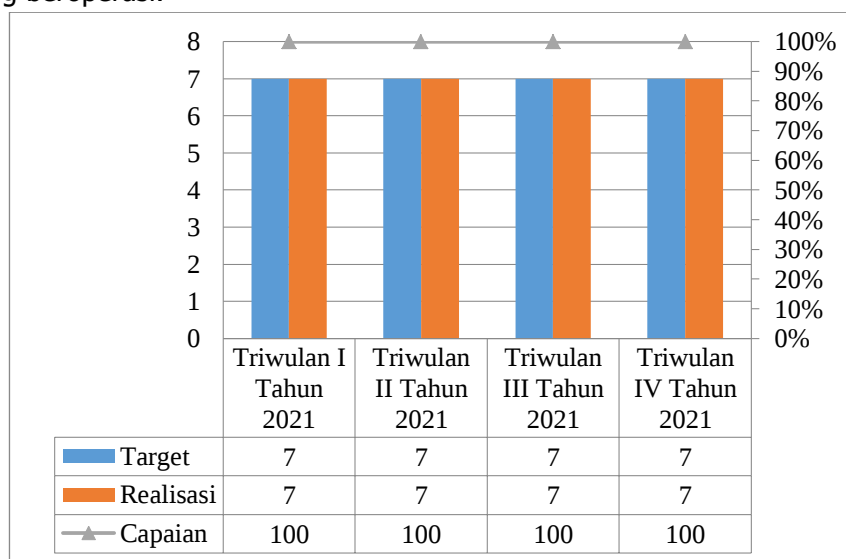
IKK 6. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi ini mencapai sebesar 100% dan terdapat pembangunan halte sungai di 10 lokasi.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Capaian Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2021 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target PK 2021 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 6 Grafik capaian IKK Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi.



Gambar III 5 Grafik Capaian IKK Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan



Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan halte sungai yang berada di 10 lokasi yaitu :

1. Pembangunan Halte Sungai Desa Sungai Tawar 2 Kec. Mendahara Kabupaten Tanjab Timur progress fisiknya s/d Triwulan IV adalah sebesar 100%;
2. Pembangunan Halte Sungai Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur progress fisiknya s/d Triwulan IV adalah sebesar 100%;
3. Pembangunan Halte Sungai Desa Rantau Rasau Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjab Timur progress fisiknya s/d Triwulan IV adalah sebesar 100%;
4. Pembangunan Halte Sungai Dusun Berbak Kec. Berbak Kumpeh Kab. Tanjab Timur progress fisiknya s/d Triwulan IV adalah sebesar 100%;
5. Pembangunan Halte Sungai Desa Londerang Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi progress fisiknya s/d Triwulan IV adalah sebesar 100%;
6. Pembangunan Halte Sungai Desa Rondang Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi progress fisiknya s/d Triwulan IV adalah sebesar 100%;
7. Pembangunan Halte Sungai Desa Pasar Terusan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari progress fisiknya s/d Triwulan IV adalah sebesar 100%;
8. Pembangunan Halte Sungai Desa Mendahara Tengah Kec. Mendahara Tengah Kab. Tanjab Timur progress fisiknya s/d Triwulan IV adalah sebesar 100%;
9. Pembangunan Halte Sungai Desa Sinar Kalimantan Kec. Mendahara Kab. Tanjab Timur progress fisiknya s/d Triwulan III adalah sebesar 100%;
10. Pembangunan Halte Sungai Candi Muaro Jambi Kab. Muaro Jambi progress fisiknya s/d Triwulan IV adalah sebesar 100%.

Pada pelabuhan penyeberangan Kuala Tungkal terdapat Satuan Pelayanan Pengawasan dari BPTD V Jambi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelabuhan penyeberangan Kuala Tungkal.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan;
2. Melakukan pengawasan secara periodik;
3. Melakukan pembangunan prasarana pelabuhan berdasarkan rencana induk Pelabuhan yang telah disusun.

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

BPTD Wilayah V Provinsi Jambi merupakan salah satu balai di bawah direktorat jenderal perhubungan darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi



mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh BPTD Wilayah V Provinsi Jambi adalah dicapai melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang didukung oleh indikator kinerja yaitu dengan terwujudnya kinerja pelayanan transportasi darat.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 7. Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A;
2. IKK 8. Persentasi Penerapan SMART Terminal Tipe A;
3. IKK 9. Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP.

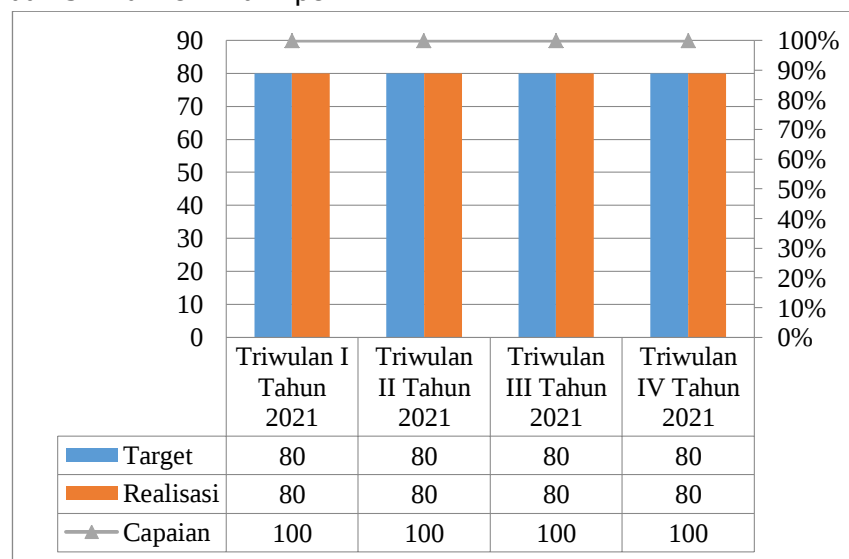
IKK 7. Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A ini mencapai sebesar 80% dan terdapat 4 TTA di Provinsi Jambi yang telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Capaian Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A Tahun 2021 sebesar 80%, jika dibandingkan dengan target PK 2021 maka capaian kinerja mencapai 80%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 7. Grafik capaian IKK Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A.



Gambar III 6 Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pada Terminal Tipe A di Provinsi Jambi yaitu Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi, Terminal Tipe A Sribulan Sarolangun, Terminal Tipe A Pulau Tujuh Merangin



dan Terminal Tipe A Muara Bungo telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan pengawasan secara periodic terhadap SPM di Terminal Tipe A di Provinsi Jambi;
2. Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan angkutan jalan terkait SPM pelayanan angkutan jalan;
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan angkutan jalan yang melanggar ketentuan yang ada.

IKK 8. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Untuk capaian kinerja Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A belum menerapkan SMART Terminal pada Tahun 2021.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Belum menerapkan SMART Terminal pada Tahun 2021

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Belum menerapkan SMART Terminal pada Tahun 2021

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Belum menerapkan SMART Terminal pada Tahun 2021

IKK 9. Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP

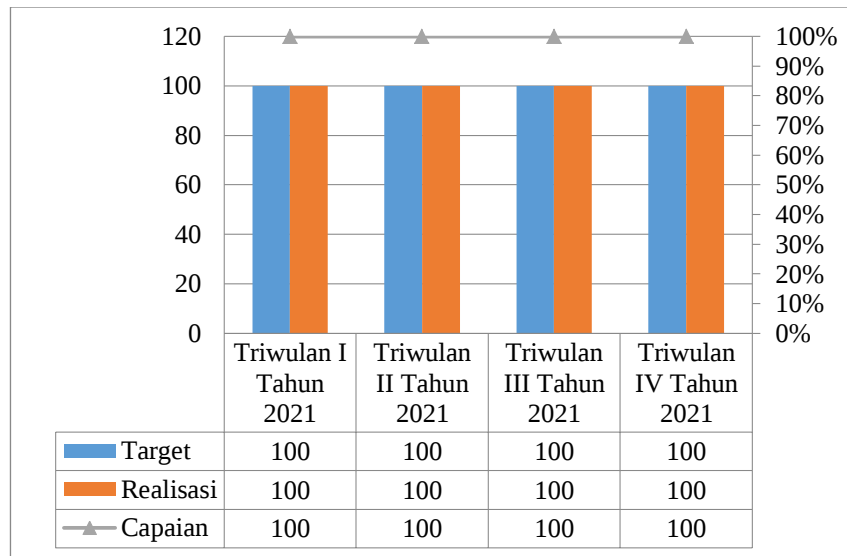
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Persentase pelaksanaan SPM di pelabuhan SDP tercapai sebesar 100%.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Capaian Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A Tahun 2021 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target PK 2021 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 9 Grafik capaian IKK Persentase pelaksanaan SPM di pelabuhan SDP.





Gambar III 7 Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan SPM di pelabuhan SDP

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal sudah dilaksanakan dengan baik dengan pengawasan dari Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan pengawasan secara periodic terhadap SPM di Pelabuhan SDP di Provinsi Jambi;
2. Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan angkutan penyeberangan terkait SPM pelayanan angkutan penyeberangan;
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan angkutan penyeberangan yang melanggar ketentuan yang ada.

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatkan keselamatan transportasi darat

BPTD Wilayah V Provinsi Jambi merupakan salah satu balai di bawah direktorat jenderal perhubungan darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh BPTD Wilayah V Provinsi Jambi adalah dicapai melalui program pengelolaan dan



penyelenggaraan transportasi darat yang didukung oleh indikator kinerja yaitu dengan terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal;
2. IKK 11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat;
3. IKK 12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, Rass, dan batas kecepatan di jalan nasional
4. IKK 13. Jumlah ketersediaan taman edukasi;
5. IKK 14. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang

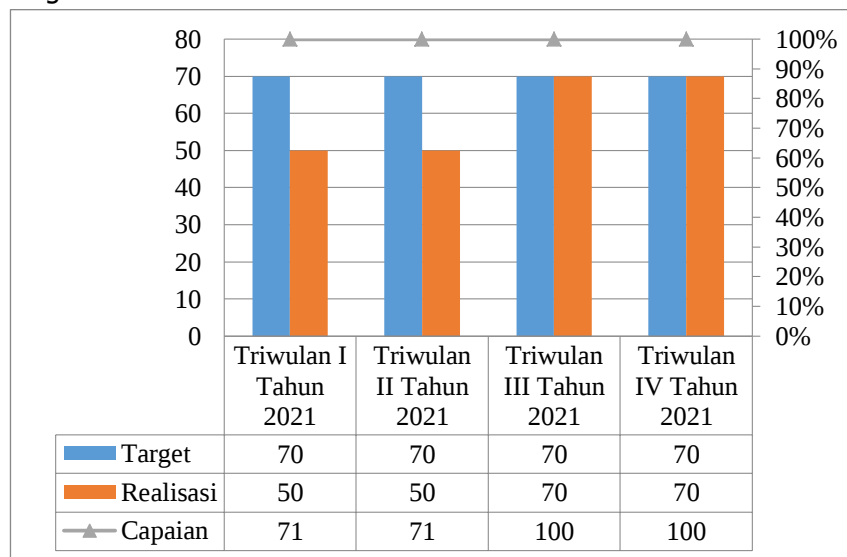
IKK 10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada indikator persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal ini terdapat beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 70%.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Capaian persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Tahun 2021 sebesar 70%, jika dibandingkan dengan target PK 2021 maka capaian kinerja mencapai 70%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 10. Grafik capaian IKK persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan.



Gambar III 8 Grafik Capaian IKK persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pada Tahun 2021 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan :

- 1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan



- Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional Ruas 02 Merlung - Bts. Kab. Tanjab dan sudah selesai 100%.
 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional Ruas 03 Bts. Kab. Tanjab - Sp. Tuan dan sudah selesai 100%.
 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional Ruas 007 Bts. Kota Jambi – Tempino dan sudah selesai 100%.
 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional Ruas 009 Bts. Prov. Sumbar - Bts. Kota Muara Bungo dan sudah selesai 100%.
 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional Ruas 010 Bts. Muara Bungo - Bts. Kab. Bungo/Kab. Merangin dan sudah selesai 100%.
 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Nasional Ruas 014 Sarolangun - Bts. Prov. Sumsel dan sudah selesai 100%.
- 2) Pengadaan dan pemasangan ATCS Kota Jambi
Progress saat ini sudah kontrak dan progress fisik fisik s/d Triwulan IV 2021 mencapai 100%.
 - 3) Bantuan teknis perlengkapan jalan pemenang WTN Provinsi Jambi
Progress saat ini sudah kontrak dan progress fisik fisik s/d Triwulan IV 2021 mencapai 100%.
 - 4) Pemeliharaan perlengkapan jalan nasional Provinsi Jambi
Progress saat ini sudah kontrak dan progress fisik fisik s/d Triwulan IV 2021 mencapai 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

- 1) Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas perlengkapan jalan yang rusak;
- 2) Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya untuk bersama-sama menjaga fasilitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang.

IKK 11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

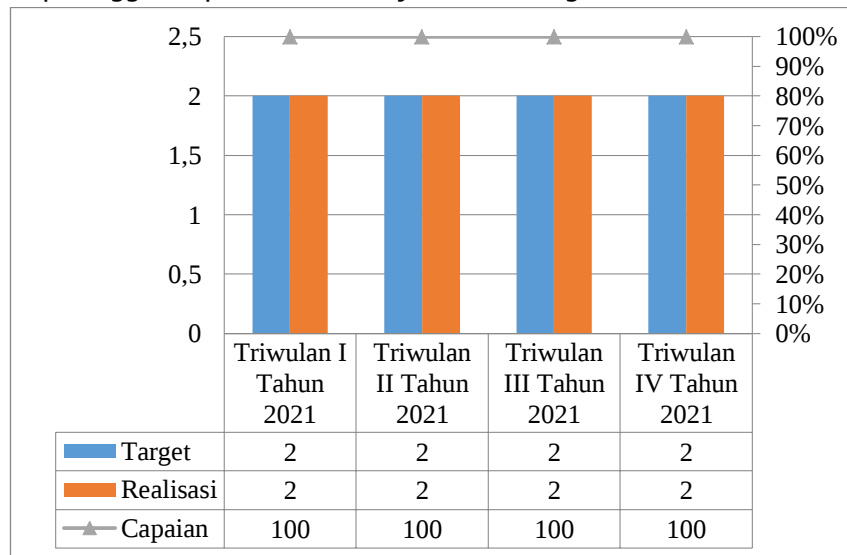
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat ini terdapat beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 2%.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021



Capaian Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2021 sebesar 2%, jika dibandingkan dengan target PK 2021 maka capaian kinerja mencapai 2%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 11. Grafik capaian IKK Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar III 9 Grafik Capaian IKK Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Persentase pelanggaran pada Satuan Pelayanan UPPKB yang beroperasi di Provinsi Jambi yaitu UPPKB Jambi Merlung, UPPKB Muara Tembesi dan UPPKB Sarolangun sampai dengan triwulan III Tahun 2021 mencapai 2%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

- 1) Melakukan sosialisasi kepada para pengusaha/masyarakat terkait maximum Over Dimensi Over Load (ODOL) kendaraan barang;
- 2) Memberikan sanksi tegas kepada sopir yang melanggar ketentuan ODOL.

IKK 12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, Rass dan batas kecepatan di jalan nasional

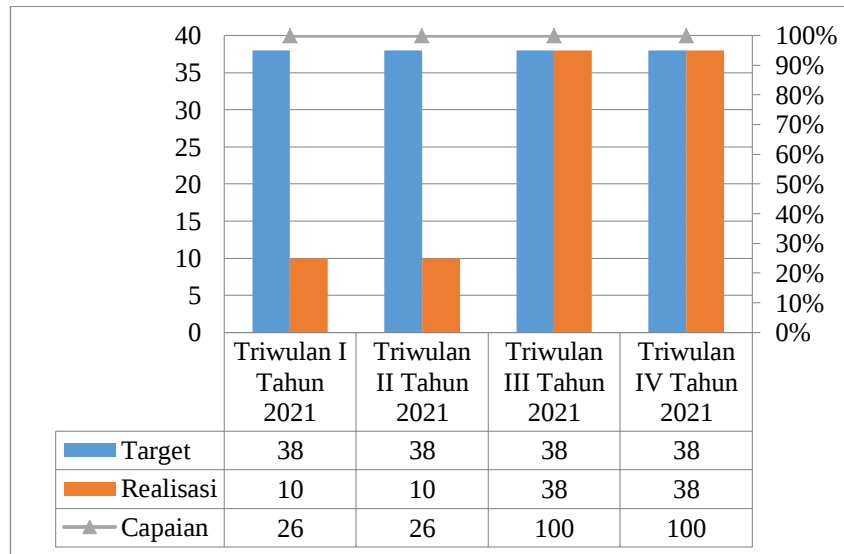
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, Rass dan batas kecepatan di jalan nasional ini terdapat beberapa kegiatan dengan capaian kinerja pada Triwulan III sebesar 30%.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021



Capaian Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, Rass dan batas kecepatan di jalan nasional Tahun 2021 sebesar 30%, jika dibandingkan dengan target PK 2021 maka capaian kinerja mencapai 30%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 12. Grafik capaian IKK Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, Rass dan batas kecepatan di jalan nasional.



Gambar III 10 Grafik Capaian IKK Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, Rass dan batas kecepatan di jalan nasional

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan ZoSS sudah kontrak dan progress fisik s/d Triwulan IV mencapai 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

- 1) Melakukan pembangunan ZoSS, Rass dan batas kecepatan di jalan nasional;
- 2) Melakukan pemeliharaan terhadap ZoSS yang terpasang.

IKK 13. Jumlah Ketersediaan Taman Edukasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Untuk capaian kinerja Jumlah ketersediaan taman edukasi tidak ada kegiatan pada Tahun 2021.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Tidak ada kegiatan pada Tahun 2021

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Tidak ada kegiatan pada Tahun 2021



a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Tidak ada kegiatan pada Tahun 2021

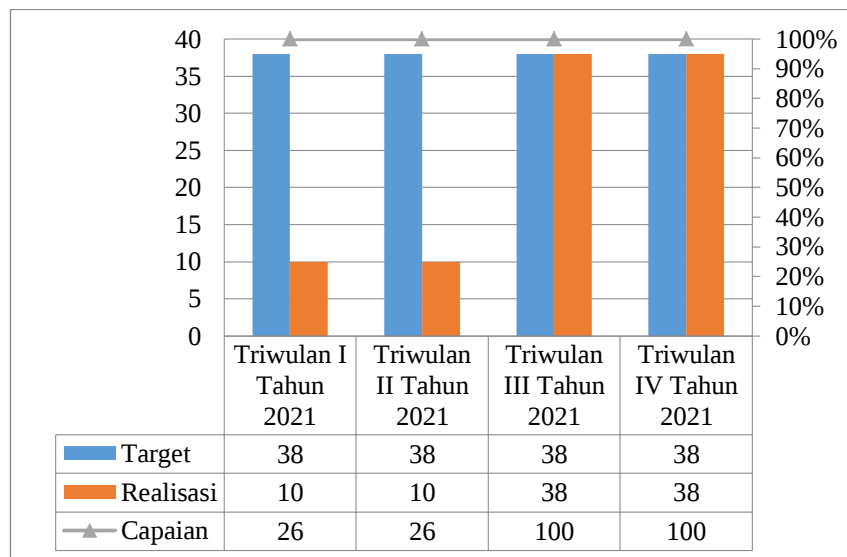
IKK 14. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan ini terdapat beberapa kegiatan dengan capaian kinerja pada Triwulan IV sebesar 100%.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Capaian Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2021 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target PK 2021 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 14. Grafik capaian IKK Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan.



Gambar III 11 Grafik Capaian IKK Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembangunan ZoSS sudah kontrak dan progress fisik s/d Triwulan IV mencapai 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :



- 1) Melakukan pembangunan ZoSS, Rass dan batas kecepatan di jalan nasional;
- 2) Melakukan pemeliharaan terhadap ZoSS yang terpasang.

IKK 15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standard internasional (UN-ECE)

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Untuk capaian kinerja Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standard internasional (UN-ECE) tidak ada kegiatan pada Tahun 2021.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Tidak ada kegiatan pada Tahun 2021

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Tidak ada kegiatan pada Tahun 2021

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Tidak ada kegiatan pada Tahun 2021

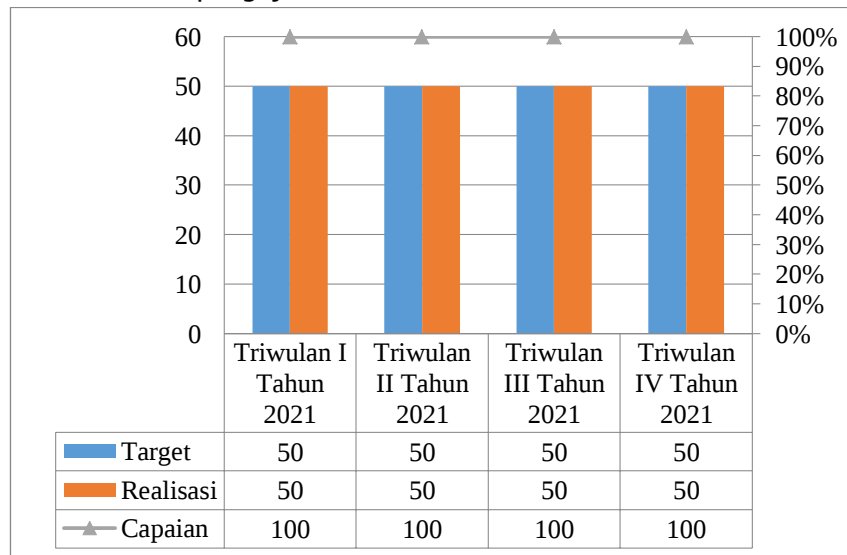
IKK 16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor ini terdapat beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 60%.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Capaian Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2021 sebesar 60%, jika dibandingkan dengan target PK 2021 maka capaian kinerja mencapai 60%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 16. Grafik capaian IKK Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor.



Gambar III 12 Grafik Capaian IKK Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Kegiatannya adalah pengadaan alat kalibrasi uji berkala kendaraan bermotor dan sampai dengan Triwulan IV 2021 progress fisik sudah 100%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 2) Meningkatkan SDM penguji kendaraan bermotor.

IKK 17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Untuk capaian kinerja kegiatan pengadaan Rambu Sungai di Sungai Batanghari pada POK terbaru dihapuskan karena adanya Refocusing anggaran.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Kegiatan dihapuskan karena adanya Refocusing anggaran pada Tahun 2021

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

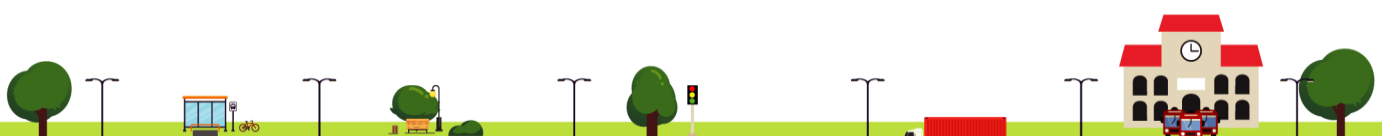
Kegiatan dihapuskan karena adanya Refocusing anggaran pada Tahun 2021

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Melaksanakan pemasangan rambu sungai di alur pelayaran SDP Provinsi Jambi.

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

BPTD Wilayah V Provinsi Jambi merupakan salah satu balai di bawah direktorat jenderal perhubungan darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang



dilakukan oleh BPTD Wilayah V Provinsi Jambi adalah dicapai melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang didukung oleh indikator kinerja yaitu dengan terwujudnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

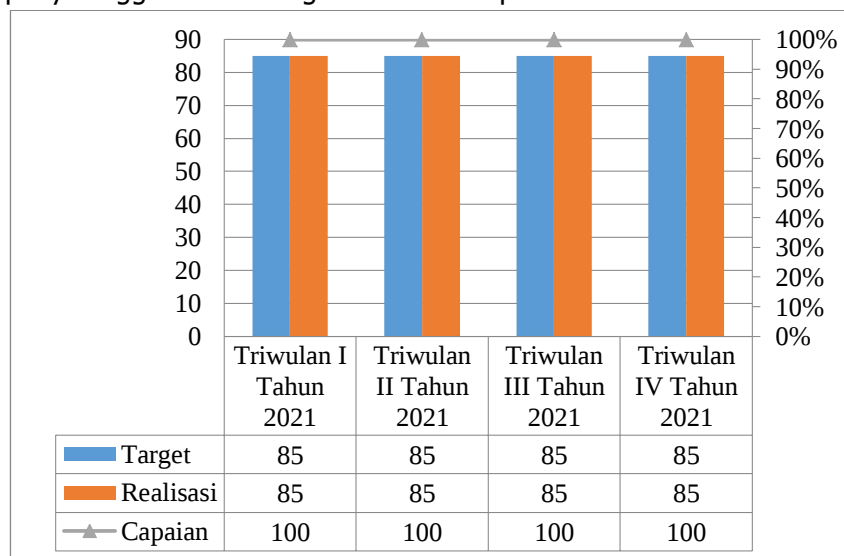
IKK 18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat ini terdapat beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Capaian Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2021 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target PK 2021 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 18 Grafik capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.



Gambar III 13 Grafik Capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat :

- Bimbingan Teknis dan Sosialisasi BPTD;
- Pengiriman diklat pegawai;
- Peningkatan motivasi bagi pegawai BPTD Wilayah V Provinsi Jambi;
- Sosialisasi dasar -dasar keselamatan transportasi sungai danau dan penyeberangan bagi SDM Perhubungan di Provinsi Jambi;



- Perencanaan dan evaluasi program kerja Ditjen Perhubungan Darat Penyusunan SAKIP, SPIP, LAPTAH dan Profil BPTD;
- Koordinasi kelembagaan rapat teknis/koordinasi/konsolidasi;
- Monitoring dan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru;
- Pemeriksaan fisik rancang bangun perusahaan karoseri;
- Monitoring dan evaluasi kinerja angkutan komersil dan perintis jalan dan penyeberangan;
- Monitoring dan pembahasan Andalalin;
- Pengawasan dan penegakkan hukum;
- Pelaksanaan Kalibrasi alat uji UPUBKB;
- Monitoring dan pemantauan fasilitas prasarana sungai danau dan penyeberangan di Provinsi Jambi;
- Inspeksi keselamatan angkutan umum penumpang sungai, danau dan penyeberangan.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu melaksanakan tugas dan fungsi BPTD V Jambi secara optimal.

Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat dan akuntabel

BPTD Wilayah V Provinsi Jambi merupakan salah satu balai di bawah direktorat jenderal perhubungan darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh BPTD Wilayah V Provinsi Jambi adalah dicapai melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat yang didukung oleh indikator kinerja yaitu dengan terwujudnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat.



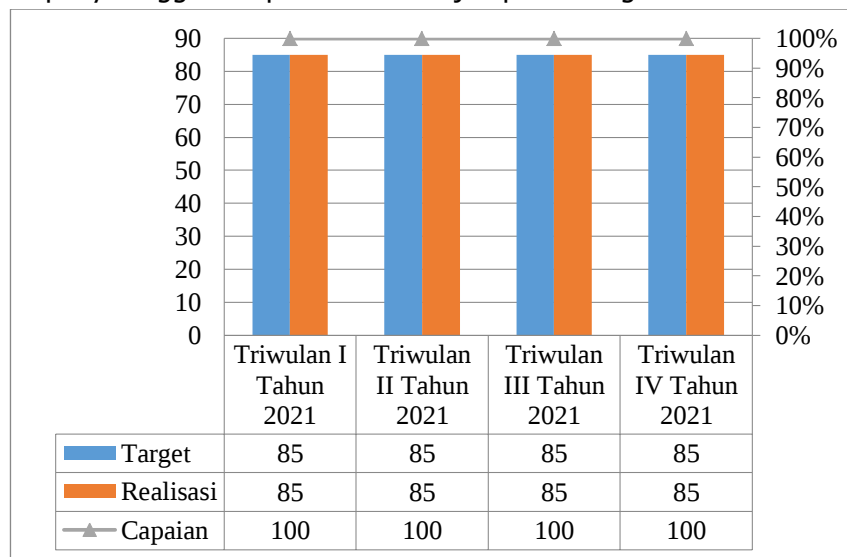
IKK 19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada indikator tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat ini terdapat beberapa kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Capaian tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat Tahun 2021 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target PK 2021 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar III. 19. Grafik capaian IKK tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat.



Gambar III 14 Grafik Capaian IKK tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat yang didukung oleh indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

- Operasional dan pemeliharaan kantor;
- Belanja modal dan peralatan dan mesin;
- Rehab Gedung kantor BPTD V Provinsi Jambi;
- Pengadaan interior kantor BPTD V Provinsi Jambi;
- Belanja gaji dan tunjangan.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan meningkatkan layanan penyelenggaraan perkantoran BPTD Wilayah V Provinsi Jambi.



III. 3. REALISASI ANGGARAN

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2021

III.3.1.1. Pagu Anggaran

- 1) Pagu Awal DIPA TA. 2021 sebesar **Rp 129.371.473.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 1 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2021

RM	Rp.	93.017.043.000	71,90%
PNBP	Rp.	36.354.430.000	28,10%
SBSN	Rp.	0	0,00%
Total	Rp.	129.371.473.000	100%

Tabel III. 2 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2021

Belanja Pegawai	Rp.	16.567.501.000	12,81%
Belanja Barang	Rp.	58.021.307.000	44,85%
Belanja Modal	Rp.	54.782.665.000	42,35%
Total	Rp.	129.371.473.000	100%

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Ditjen Hubdat TA. 2021 akibat adanya Revisi DIPA di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp. 29.605.605.000,- Sehingga Total Pagu akhir DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Triwulan IV TA. 2021 adalah sebesar Rp. 99.765.868.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 3 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan IV TA. 2021

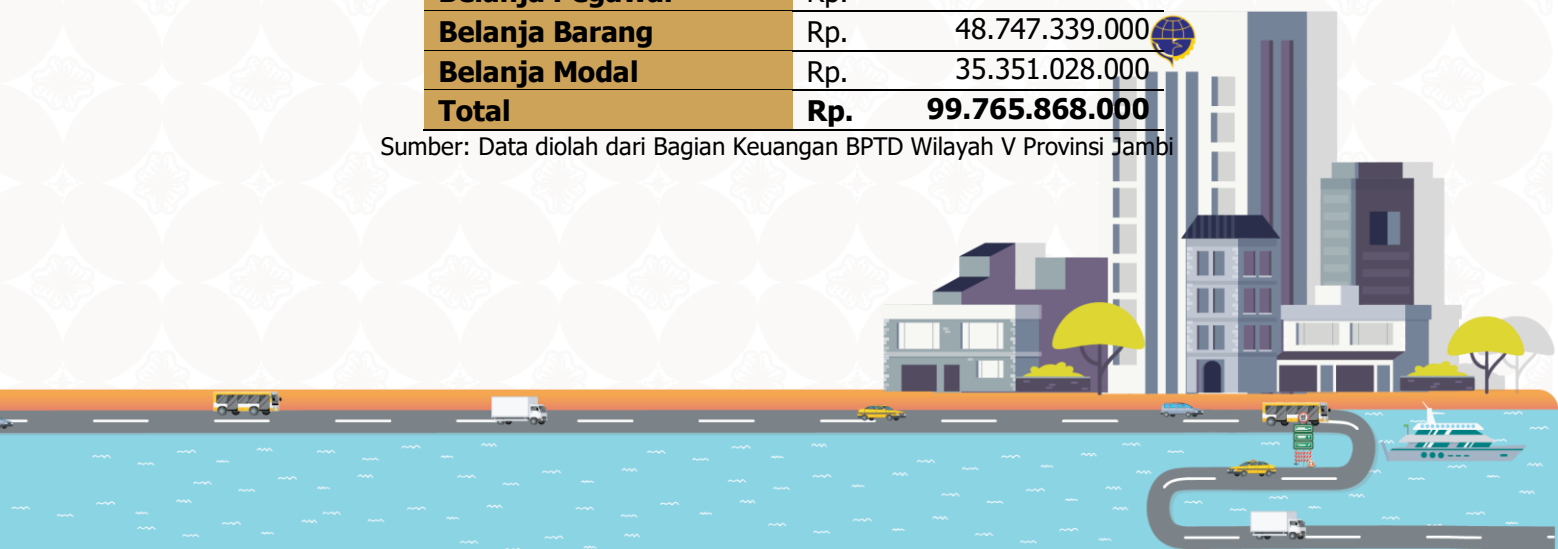
RM	Rp.	65.456.509.000	98,19%
PNBP	Rp.	34.309.359.000	96,83%
SBSN	Rp.	0	0,00%
Total	Rp.	99.765.868.000	97,52%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi

Tabel III. 4 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan IV TA. 2021

Belanja Pegawai	Rp.	15.667.501.000
Belanja Barang	Rp.	48.747.339.000
Belanja Modal	Rp.	35.351.028.000
Total	Rp.	99.765.868.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi



III.3.1.2.Refocussing Anggaran Tahun 2021

Berikut adalah rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja.

Tabel III. 5 Rincian Revisi Per Sumber Dana T.A. 2021

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	93.017.043.000	36.354.430.000		129.371.473.000
REVISI KE-1	62.171.572.000	36.354.430.000		98.526.002.000
REVISI KE-2	62.171.572.000	36.354.430.000		98.526.002.000
REVISI KE-3	61.471.572.000	36.354.430.000		97.826.002.000
REVISI KE-4	60.375.577.000	36.354.430.000		96.730.007.000
REVISI KE-5	59.861.568.000	36.354.430.000		96.215.998.000
REVISI KE-6	59.661.568.000	36.354.430.000		96.015.998.000
REVISI KE-7	59.326.519.000	36.354.430.000		95.680.949.000
REVISI KE-8	59.956.509.000	34.309.359.000		94.265.868.000
REVISI KE-9	65.456.509.000	34.309.359.000		99.765.868.000
REVISI KE-10	65.456.509.000	34.309.359.000		99.765.868.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi

Tabel III. 6 Rincian Revisi per Jenis Belanja T.A. 2021

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	16.567.501.000	58.021.307.000	54.782.665.000	129.371.473.000
REVISI KE-1	16.567.501.000	50.588.427.000	31.370.074.000	98.526.002.000
REVISI KE-2	16.567.501.000	50.588.427.000	31.370.074.000	98.526.002.000
REVISI KE-3	15.867.501.000	50.588.427.000	31.370.074.000	97.826.002.000
REVISI KE-4	15.867.501.000	50.588.427.000	30.274.079.000	96.730.007.000
REVISI KE-5	15.867.501.000	50.074.418.000	30.274.079.000	96.215.998.000
REVISI KE-6	15.667.501.000	50.074.418.000	30.274.079.000	96.015.998.000
REVISI KE-7	15.667.501.000	50.074.418.000	29.939.030.000	95.680.949.000
REVISI KE-8	15.667.501.000	48.747.339.000	29.851.028.000	94.265.868.000
REVISI KE-9	15.667.501.000	48.747.339.000	35.351.028.000	99.765.868.000
REVISI KE-10	15.667.501.000	48.747.339.000	35.351.028.000	99.765.868.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi



Tabel III. 7 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja T.A. 2021

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN III	PAGU AKHIR PER TRIWULAN IV
Belanja Pegawai	16.567.501.000	0	16.567.501.000	(700.000.000)	15.867.501.000	(200.000.000)	15.667.501.000	15.667.501.000
Belanja Barang	58.021.307.000	(7.432.880.000)	50.588.427.000	-	50.588.427.000	(514.009.000)	50.074.418.000	48.747.339.000
· RM	33.021.307.000	(7.432.880.000)	25.588.427.000		25.588.427.000	(514.009.000)	25.074.418.000	25.704.408.000
· PNPB	25.000.000.000	0	25.000.000.000		25.000.000.000		25.000.000.000	23.042.931.000
Belanja Modal	54.782.665.000	(23.412.591.000)	31.370.074.000	-	31.370.074.000	(1.431.044.000)	29.939.030.000	35.351.028.000
· RM	43.428.235.000	(23.412.591.000)	20.015.644.000		20.015.644.000	(1.431.044.000)	1,879,844,111,000	24.084.600.000
· PNPB	11.354.430.000	0	11.354.430.000		11.354.430.000		11.354.430.000	11.266.428.000
TOTAL	Rp129.371.473.000	(Rp30.845.471.000)	Rp98.526.002.000	Rp(700.000.000)	Rp97.826.002.000	(Rp.2.145.053.000)	Rp.95.860.949.000	99.765.868.000

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPTD V Jambi Tahun 2021

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel III. 8 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2021

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I REALIASI	%	PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II REALIASI	%	PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III REALIASI	%	PAGU PER TRIWULAN IV	TRIWULAN IV REALIASI	%
022.03	Ditjen Perhubungan Darat	129.371.473.000	98.526.002.000	542.138.210	10,81%	97.826.002.000	38.486.821.766	39,34%	95.680.949.000	62.411.631.708	65,23%	99.765.868.000	97.287.819.468	97,52%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	105.000.188.000	74.254.717.000	5.685.831.630	7,66%	74.254.717.000	26.302.062.198	35,42%	72.309.664.000	45.449.792.779	62,85%	75.664.593.000	73.637.079.960	97,32%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	43.722.358.000	27.722.358.000	542.138.200	1,96%	27.722.358.000	5.663.464.350	20,43%	27.722.358.000	12.687.624.114	45,77%	25.765.289.000	24.771.279.650	96,14%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	13.549.148.000	13.549.148.000	1.005.279.989	7,42%	13.549.148.000	5.147.607.663	37,99%	13.528.139.000	8.513.303.898	62,93%	16.622.939.000	16.293.730.748	98,02%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	44.960.167.000	30.214.696.000	3.760.224.619	12,45%	30.214.696.000	14.623.187.341	48,40%	28.783.652.000	22.932.106.586	79,67%	31.000.850.000	30.335.228.591	97,85%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	2.768.515.000	2.768.515.000	378.188.822	13,66%	2.768.515.000	867.802.844	31,35%	2.275.515.000	1.316.758.181	57,87%	2.275.515.000	2.236.840.971	98,30%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	24.371.285.000	24.271.285.000	5.147.893.613	21,21%	23.571.285.000	12.184.759.568	51,69%	23.371.285.000	16.961.838.929	72,58%	24.101.275.000	23.650.739.508	98,13%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	7.803.784.000	7.703.784.000	2.006.009.673	26,04%	7.703.784.000	4.399.011.737	57,10%	7.703.784.000	5.767.581.383	74,87%	8.433.774.000	8.281.838.170	98,20%
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	16.567.501.000	16.567.501.000	3.141.883.940	18,96%	15.867.501.000	7.785.747.831	49,07%	15.667.501.000	11.194.257.546	71,45%	15.667.501.000	15.368.901.338	98,09%

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan BPTD Wilayah V Provinsi Jambi

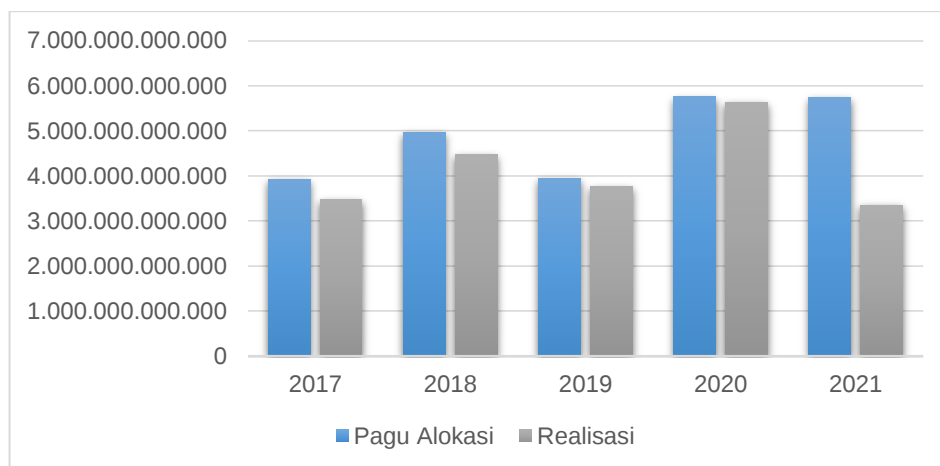


III.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2017 – 2021, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 9 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2020

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2017	316.524.000	316.524.000	314.126.196	99,24%
2	2018	69.469.351.000	66.031.283.000	61.239.460.288	92,74%
3	2019	65.255.894.000	64.143.430.000	63.025.827.135	98.26%
4	2020	88.949.535.000	99.150.386.000	97.656.432.484	98.49%
5	2021	129.371.473.000	99.765.868.000	97.287.819.468	97,52%



Gambar III 2 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2020

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2020 anggaran yang terserap sebesar Rp. 97.656.432.484,- atau mencapai 98,49% dari pagu akhir Rp. 99.150.386.000,-. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan serapan anggaran yaitu sebesar Rp. 97.287.819.468,- atau mencapai 97,52% dari pagu akhir Rp. 99.765.868.000,-.

Realisasi Anggaran

III.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2021

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel III. 10 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III		PAGU PER TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	
				REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%
022.03	Ditjen Perhubungan Darat	129.371.473.000	98.526.002.000	542.138.210	10,81%	97.826.002.000	38.486.821.766	39,34%	95.680.949.000	62.411.631.708	65,23%	99.765.868.000	97.287.819.468	97,52%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	105.000.188.000	74.254.717.000	5.685.831.630	7,66%	74.254.717.000	26.302.062.198	35,42%	72.309.664.000	45.449.792.779	62,85%	75.664.593.000	73.637.079.960	97,32%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	43.722.358.000	27.722.358.000	542.138.200	1,96%	27.722.358.000	5.663.464.350	20,43%	27.722.358.000	12.687.624.114	45,77%	25.765.289.000	24.771.279.650	96,14%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	13.549.148.000	13.549.148.000	1.005.279.989	7,42%	13.549.148.000	5.147.607.663	37,99%	13.528.139.000	8.513.303.898	62,93%	16.622.939.000	16.293.730.748	98,02%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	44.960.167.000	30.214.696.000	3.760.224.619	12,45%	30.214.696.000	14.623.187.341	48,40%	28.783.652.000	22.932.106.586	79,67%	31.000.850.000	30.335.228.591	97,85%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	2.768.515.000	2.768.515.000	378.188.822	13,66%	2.768.515.000	867.802.844	31,35%	2.275.515.000	1.316.758.181	57,87%	2.275.515.000	2.236.840.971	98,30%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	24.371.285.000	24.271.285.000	5.147.893.613	21,21%	23.571.285.000	12.184.759.568	51,69%	23.371.285.000	16.961.838.929	72,58%	24.101.275.000	23.650.739.508	98,13%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	7.803.784.000	7.703.784.000	2.006.009.673	26,04%	7.703.784.000	4.399.011.737	57,10%	7.703.784.000	5.767.581.383	74,87%	8.433.774.000	8.281.838.170	98,20%
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	16.567.501.000	16.567.501.000	3.141.883.940	18,96%	15.867.501.000	7.785.747.831	49,07%	15.667.501.000	11.194.257.546	71,45%	15.667.501.000	15.368.901.338	98,09%

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 97.287.819.468,-** atau mencapai **97,52%** dari total pagu sebesar **Rp. 99.765.868.000,-**.



III.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2021 yang sudah di analisis per Triwulan I/II/III/IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 11 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan IV 2021

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I		PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II		PAGU ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III		PAGU ALOKASI (TW IV)	REALISASI TW IV	
		Rp. (Ribu)	Rp. (Ribu)	%	Rp. (Ribu)	Rp. (Ribu)	%	Rp. (Ribu)	Rp. (Ribu)	%	Rp. (Ribu)	Rp. (Ribu)	%
1	Belanja Pegawai	16.567.501	3.141.883	18,96%	15.867.501	7.785.747.	49,07%	15.667.501	11.194.257	71,45%	15.667.501	15.368.901	98,09%
2	Belanja Barang	50.588.427	4.381.044	8,66%	50.588.427	13.578.820	26,84%	50.074.418	25.007.911	49,94%	48.747.339	46.916.341	96,24%
3	Belanja Modal	31.370.074	3.310.796	10,55%	31.370.074	17.122.252	54,58%	29.939.030	26.209.462.	87,54%	35.351.028	35.002.576	99,01%
TOTAL		98.526.002	10.833.725	11,00%	97.826.002	38.486.821	39,34%	95.680.949	62.411.631	65,23%	99.765.868	97.287.819	97,52%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2021 dari Triwulan I – IV mengalami peningkatan, yang awalnya pada Triwulan I itu realisasi hanya sebesar 11,00% namun pada Triwulan II mengalami peningkatan menjadi 39,34% dan juga terus meningkat pada Triwulan III yaitu mencapai 65,23% dan pada Triwulan IV mencapai 97,51%

III.3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2021

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2021 yang sudah di analisis per Triwulan I/II/III/IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 12 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan IV 2021

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I		PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II		PAGU ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III		PAGU ALOKASI (TW IV)	REALISASI TW IV	
		Rp. (Ribu)	Rp. (Ribu)	%	Rp. (Ribu)	Rp. (Ribu)	%	Rp. (Ribu)	Rp. (Ribu)	%	Rp. (Ribu)	Rp. (Ribu)	%
1	Rupiah Murni	62.171.572	10.833.725	17,43%	61.471.572	29.970.352	48,21%	59.326.519	43.165.778	72,7%	65.456.509	64.274.059	98,19%
2	PNBP	36.354.430.		0,00%	36.354.430	8.516.469	23,43%	36.354.430	19.245.853	52,94%	34.309.359	33.221.051	96,83%
3	SBSN												
TOTAL		98.526.002	10.833.725	11,00%	97.826.002	38.486.821	39,06%	95.680.949	62.411.631	65,23%	99.765.868	97.495.710	97,72%



Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2021 dari Triwulan I – IV mengalami peningkatan, yang awalnya pada Triwulan I itu realisasi hanya sebesar 11,00% namun pada Triwulan II mengalami peningkatan menjadi 39,34% dan juga terus meningkat pada Triwulan III yaitu mencapai 65,23%, dan terakhir pada Triwulan IV mencapai 97,52%.

III.3.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2021, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 13 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	15.667.501.000	15.368.901.338	298.599.662
2	Belanja Barang	48.747.339.000	46.916.341.754	1.830.997.246
3	Belanja Modal	35.351.028.000	35.002.576.376	348.451.624
TOTAL		99.765.868.000	97.287.819.468	2.478.048.532

Tabel III. 14 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2021

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	65.456.509.000	64.066.168.268	1.390.340.732
2	PNBP	34.309.359.000	33.221.651.200	1.087.707.800
3	SBSN			
TOTAL		99.765.868.000	97.287.819.468	2.478.048.532

Tabel III. 15 Rincian sisa Anggaran Tahun 2021

NO	Sisa Anggaran	PAGU AKHIR	REALISASI
		Rp.	Rp.
			97.287.819.468
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana		-
2	Kegiatan yang Terblokir		-
3	Sisa Kontraktual		1.195.259.424
	a. Belanja Barang	846.807.800	-
	b. Belanja Modal	348.451.624	-
4	Sisa Non Kontraktual		
	a. Belanja Barang	984.189.446	984.189.446
	b. Belanja Modal	-	-
5	Sisa Belanja Pegawai		298.599.662
TOTAL			99.765.868.000

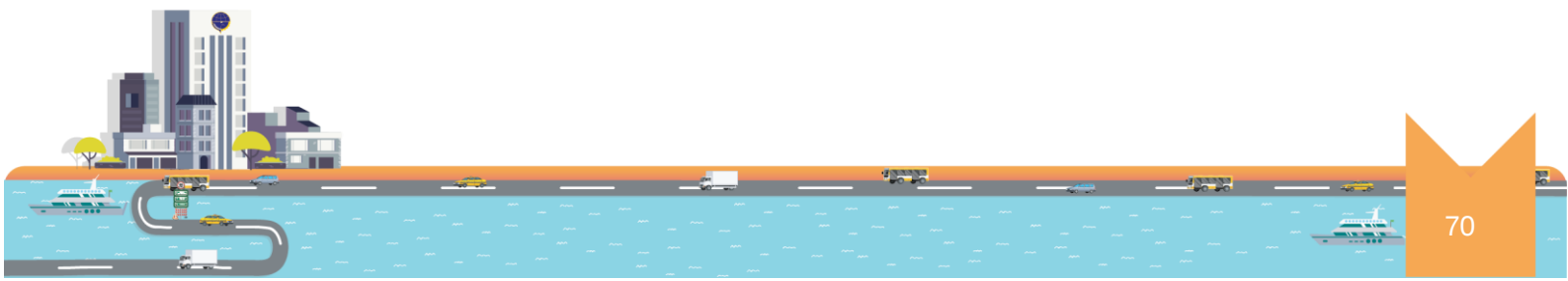
Dari total pagu anggaran BPTD V JAMBI sebesar Rp99.765.868.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang dapat terealisasi sebesar Rp97.287.819.468,- (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 97,52% sehingga total dana yang tidak terserap di BPTD V Jambi adalah sebesar Rp 2.478.048.532,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 2,48%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana;
2. Tidak Ada Kegiatan yang terblokir;
3. Sisa Kontraktual sebesar Rp 1.195.259.424,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)
 - a. Sisa belanja modal sebesar Rp 348.451.624,- berasal dari sisa kontrak yang sudah tidak dapat di realokasi dikarenakan mengacu pada PMK tentang tata cara revisi (untuk revisi DIPA antar sumber belanja dan jenis belanja merupakan wewenang DJA yang maksimal pengajuan hanya sampai 31 Oktober), sedangkan sisa belanja modal baru diketahui saat akhir tahun;
 - b. Sisa belanja barang sebesar Rp 846.807.800,- berasal dari beberapa ritase subsidi yang tidak tercapai;
4. Sisa Non Kontraktual sebesar Rp 984.189.446,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);
 - 1) Tidak ada sisa belanja modal dari Kegiatan Non Kontraktual;
 - 2) Sisa belanja barang sebesar Rp 984.189.446,- berasal dari sisa kegiatan operasional serta penunjang pada tiap satpel;
5. Sisa sumber dana PNPB sebesar Rp 1.087.707.800,- berasal dari belanja modal dan belanja barang di akhir tahun dan tidak dapat dilakukan realokasi dikarenakan dapat mengubah pagu penggunaan PNPB tiap satker yang membutuhkan proses persetujuan ke Kementerian Keuangan hingga 1 bulan, sedangkan waktu tersebut akan berdampak pada waktu pelaksanaan kegiatan;
6. Sisa Belanja Pegawai Rp 298.599.602,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Rupiah). Terdapat sisa belanja pegawai yang disebabkan terdapat kebijakan tidak dicairkannya gaji dan tunjangan ke-14 di Tahun 2021 yang kurang dari target.

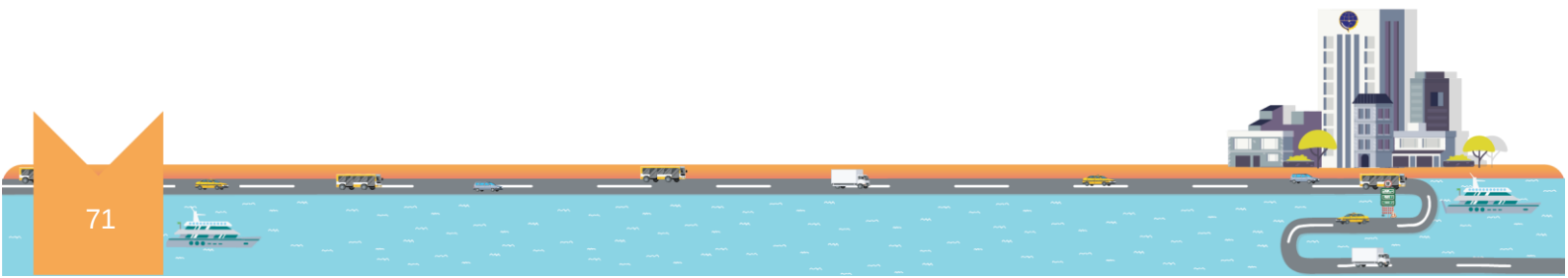
Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain:

1. Terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia sejak Maret 2020, sehingga beberapa pekerjaan sempat ditunda pengerjaannya karena PSBB di lokasi setempat, sehingga waktu penyelesaian mundur dari target.



2. Adanya refocusing anggaran untuk membantu pencegahan dampak pandemi Covid-19 sehingga beberapa pekerjaan seperti anggaran mudik gratis di Direktorat Angkutan, kegiatan penunjang teknis serta beberapa kegiatan penunjang PON XX di Papua dialihkan untuk kegiatan lain, yaitu penanganan covid dan kegiatan PEN.



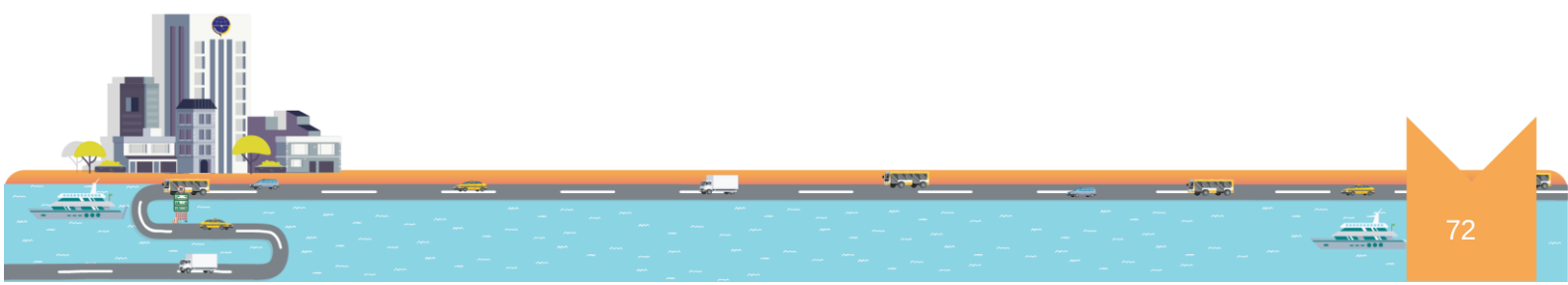
IV. Penutup

IV.1 Ringkasan Capaian

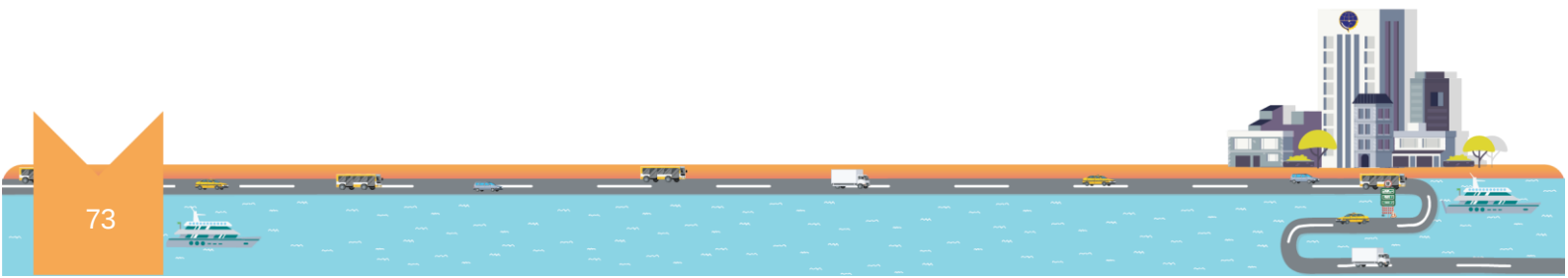
Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 ini terdapat 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi triwulan IV tahun 2021. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada triwulan IV tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - A. Presentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 100% (target 100%);
 - B. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda terealisasi sebesar 5 lokasi (target 5 lokasi);
 - C. Jumlah terminal tipe a dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi (target 4 lokasi);
 - D. Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda tidak ada realisasi dan terget dalam indikator kerja tersebut;
 - E. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi sebesar 100% (target 100%);
 - F. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi 7 lokasi (target 7 lokasi);
 - G. Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A terealisasi 80% (target 80%);
 - H. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A tidak ada realisasi dan terget dalam indikator kerja tersebut;
 - I. Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP terealisasi 100% (target 100%);
 - J. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi 70% (target 70%);
 - K. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 2% (target 2%);
 - L. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, Rass dan batas kecepatan di jalan nasional 38 lokasi (target 38 lokasi)
 - M. Jumlah ketersediaan taman edukasi tidak ada realisasi dan terget dalam indikator kerja tersebut;
 - N. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi 750 orang (target 750 orang);
 - O. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE) tidak ada realisasi dan terget dalam indikator kerja tersebut;



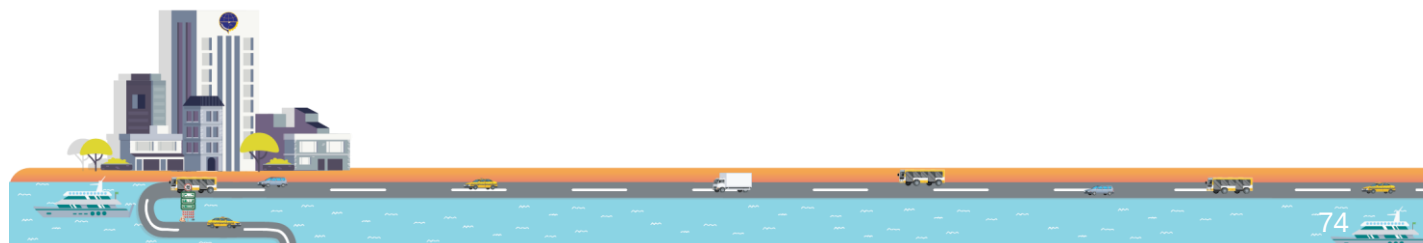
- P. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi 50% (target 50%);
 - Q. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP tidak ada realisasi dan terget dalam indikator kerja tersebut;
 - R. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tercapai 85 (target 85);
 - S. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tercapai 85 (target 85).
-
- 2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi.
 - 3. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *zero accident*.



IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target dalam PK	TRIWULAN IV			Evaluasi	tindaklanjut	penanggung jawab
					Target kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian kinerja			
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	1. Presentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan	Persen	100	100	100	100	Tercapai	1) Melakukan pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan subsidi angkutan perintis di Provinsi Jambi. 2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota terkait dengan pembukaan rute angkutan perintis yang baru.	Seksi LLAJ
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	lokasi	5	5	5	5	Tercapai	memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat	Seksi LLAJ
		3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	4	4	4	4	Tercapai	1) Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang; 2) Meningkatkan fasilitas para penumpang; 3) Melakukan pengawasan secara optimal terhadap keselamatan transportasi jalan.	Seksi Sarpras
		4. Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	lokasi	-	-	-	-	-	-	-
		5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Persen	100	100	100	100	Tercapai	1) Meningkatkan pengawasan Standar Pelayanan Minimal terhadap fasilitas Dermaga Pelabuhan dan Kapal Penyeberangan; 2) Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang;	Seksi TSDPP

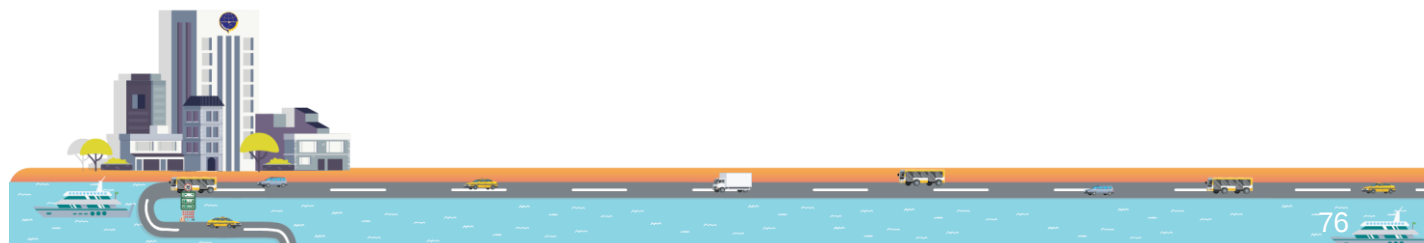


									3) Meningkatkan pengawasan keselamatan angkutan penyeberangan.	
		6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	7	7	7	7	Tercapai	1) Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan; 2) Melakukan pengawasan secara periodik; 3) Melakukan pembangunan prasarana Pelabuhan berdasarkan rencana induk Pelabuhan yang telah disusun.	Seksi TSDPP
2.	Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	7. Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A	Persen	80	80	80	80	Tercapai	1) Melakukan pengawasan secara periodik terhadap SPM di Terminal Tipe A di Provinsi Jambi; 2) Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan angkutan jalan terkait SPM pelayanan angkutan jalan; 3) Memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan angkutan jalan yang melanggar ketentuan yang ada.	Seksi Sarpras
		8. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-	-	-	-		-	-
		9. Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP	Persen	100	100	100	100	Tercapai	1) Melakukan pengawasan secara periodik terhadap SPM di Pelabuhan SDP di Provinsi Jambi; 2) Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan angkutan penyeberangan terkait SPM pelayanan angkutan penyeberangan; 3) Memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan angkutan penyeberangan yang melanggar ketentuan yang ada.	Seksi TSDPP
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi	Persen	70	70	70	70	Tercapai	1) Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas perlengkapan jalan	Seksi LLAJ

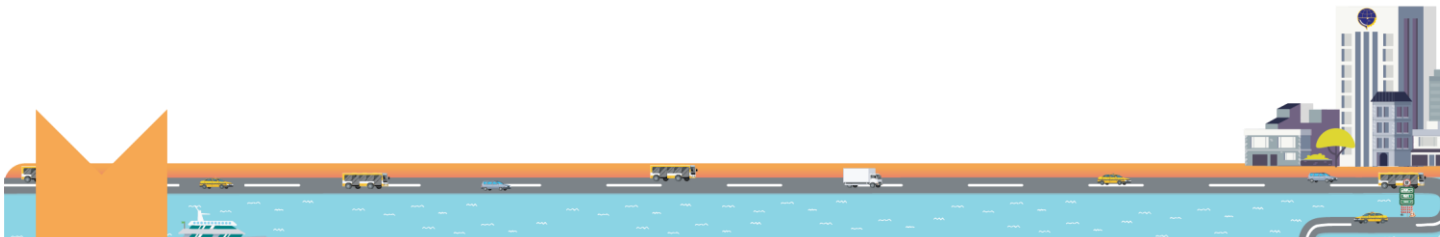


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPTD V Jambi Tahun 2021

		ideal						yang rusak; 2) Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya untuk bersama-sama menjaga fasilitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang.		
		11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Persen	2	2	2	2	Tercapai	1) Melakukan sosialisasi kepada para pengusaha/masyarakat terkait maximum Over Dimensi Over Load (ODOL) kendaraan barang; 2) Memberikan sanksi tegas kepada sopir yang melanggar ketentuan ODOL.	Seksi LLAJ
		12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, Rass dan batas kecepatan di jalan nasional	lokasi	38	38	38	38	Tercapai	1) Melakukan pembangunan ZoSS, Rass dan batas kecepatan di jalan nasional; 2) Melakukan pemeliharaan terhadap ZoSS yang terpasang.	Seksi LLAJ
		13. Jumlah ketersediaan taman edukasi	lokasi	-	-	-	-		-	-
		14. Jumlah masyarakat yang tesosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750	750	750	750	Tercapai	1) Melakukan sosialisasi keselamatan lalu lintas di Sekolah-Sekolah dan kampus serta komunitas. 2) Melaksanakan kegiatan Pekan Keselamatan Transportasi Jalan.	Seksi LLAJ
		15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-	-	-	-		-	-
		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	50	50	50	50	Tercapai	1) Meningkatkan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor; 2) Meningkatkan SDM penguji kendaraan bermotor.	Seksi Sarpras
		17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Unit	-	-	-	-		-	-
4.	Meningkatnya kualitas	18. Kualitas penyelenggaraan	Nilai	85	85	85	85	Tercapai	Melaksanakan tugas dan fungsi BPTD V	Subbag TU



	penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	dukungan teknis transportasi darat							Jambi secara optimal.	
5.	Meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat dan akuntabel	19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat	Nilai	85	85	85	85	Tercapai	Meningkatkan layanan penyelenggaraan perkantoran BPTD Wilayah V Provinsi Jambi.	Subbag TU





**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2021
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI**

JAMBI, JANUARI 2021

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI**

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	1. Presentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan	Persen	100
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	5
		3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4
		4. Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Persen	100
		6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	7. Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A	Persen	100
		8. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-
		9. Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP	Persen	100
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70
		11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Persen	2
		12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan di jalan nasional	Lokasi	38
		13. Jumlah ketersediaan taman edukasi	Lokasi	-
		14. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750

		15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-
		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	50
		17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Unit	50
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5.	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat yang akuntabel	19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Jambi, Januari 2021

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI



BAHAR, ST, MT

Pembina Tk. I - (IV/b)
NIP. 19711007 199803 1 008



REVISI
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2021
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI

JAMBI, AGUSTUS 2021

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	1. Presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	Persen	100
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	5
		3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4
		4. Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Persen	100
		6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	7. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	Persen	80
		8. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-
		9. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Persen	100
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70
		11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Persen	2
		12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	38
		13. Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-

		14. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750
		15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-
		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	60
		17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Unit	-
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5.	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Jambi, Agustus 2021

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi



Bahar, ST, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19711007 199803 1 008



REVISI
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2021
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI

JAMBI, AGUSTUS 2021

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	1. Presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	Persen	100
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	5
		3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4
		4. Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Persen	100
		6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	7. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	Persen	80
		8. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-
		9. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Persen	100
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70
		11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Persen	2
		12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	38
		13. Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-

		14. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750
		15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-
		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	60
		17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Unit	-
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5.	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Jambi, Agustus 2021

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi



Bahar, ST, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19711007 199803 1 008

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana/ Penanggungjawab
						T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	1. Presentase pelaksanaan pelayananan keperintisan angkutan jalan	Persen	100	1. Subsidi operasional angkutan jalan	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	5	1 Angkutan perintis yang melayani terminal dan pelabuhan	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4	1. Operasional Terminal Tipe A	√	√	√	√	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		4. Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-

		5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Persen	100	1.	Pengawasan Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal	√	√	√	√	Seksi TSDPP
		6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	1.	Pembangunan dermaga danau kerinci	√				Seksi TSDPP
					2.	Pembangunan halte sungai - Desa Sungai Tawar 2 Kec. Mendahara Kab. Tanjab Timur - Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur - Desa Rantau Rasau Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjab Timur - Dusun Berbak Kec. Berbak Kab. Tanjab Timur - Desa Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi - Desa Londerang Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi - Desa Rondang Kec. Kumpeh Kab.	√	√	√	√	Seksi TSDPP

						Muaro Jambi - Desa Terusan Kec. Maro sebo Kab. Batanghari - Desa Pasar Terusan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari - Desa Olak Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari					
2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	7. Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A	Persen	100	1.	Operasional terminal penumpang tipe A - Terminal Alam Barajo - Terminal Sarolangun - Terminal Bangko - Terminal Bungo	√	√	√	√	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		8. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-
		9. Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP	Persen	100	1.	Operasional Satpel pengawas pelabuhan penyeberangan Kuala Tungkal	√	√	√	√	Seksi TSDPP

3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70	1.	Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan - Ruas 02 Merlung – Bts. Kab. Tanjab - Ruas 03 Bts. Tanjab – Sp. Tuan - Ruas 004 Sp. Tuan – Bts. Kota Jambi - Ruas 007 Bts. Kota Jambi – Tempino - Ruas 008 Tempino – Bts. Prov. Sumsel - Ruas 009 Bts. Prov. Sumbar – Bts. Kota Muara Bungo - Ruas 010 Bts. Muara Bungo – Bts. Kab. Bungo/Kab. Merangin - Ruas 013 Bts. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin – Sarolangun - Ruas 014 Sarolangun – Bts. Prov. Sumsel - Ruas 016 Bts. Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun – Pauh	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
					2.	Pengadaan dan Pemasangan ATCS di Kota Jambi	√	√			Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

					3.	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional jambi	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
					4.	Bantuan teknis perlengkapan jalan pemenang WTN Provinsi Jambi	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
					5.	Pemeliharaan perlengkapan jalan nasional Provinsi Jambi	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Persen	2	1.	Operasional UPPKB - UPPKB Jambi Merlung - UPPKB Muara Tembesi - UPPKB Sarolangun - UPPKB Sungai Penuh	√	√	√	√	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan di jalan nasional	Lokasi	38	1.	Pembangunan Zoss	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

		13. Jumlah ketersediaan taman edukasi	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-
		14. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750	1.	Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standard internasional (UN-ECE)	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	50	1.	Pengadaan alat kalibrasi uji berkala kendaraan bermotor	√	√	√	√	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Unit	50	1.	Pengadaan dan pemasangan rambu sungai	√	√	√	√	Seksi TSDPP

4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	1.	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi BPTD	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha
					2.	Pengiriman Diklat Pegawai	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha
					3.	Peningkatan Motivasi Bagi Pegawai BPTD Wilayah V Provinsi Jambi	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha
					4.	Sosialisasi Dasar-dasar Keselamatan Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Bagi SDM Perhubungan di Provinsi Jambi	√	√	√	√	Seksi TSDPP
					5.	Perencanaan dan Evaluasi Program Kerja Ditjen Hubdat Penyusunan Bahan, Rencana Kerja	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha
					6.	Kegiatan Pelaporan Data dan Kinerja Ditjen Hubdat Penyusunan SAKIP, SPIP, LAPTAH dan Profil BPTD	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha
					7.	Koordinasi Kelembagaan Rapat Teknis/Koordinasi/ Konsolidasi	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha

					8.	Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
					9.	Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri	√	√	√	√	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					10.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Komersil dan Perintis Jalan dan Penyeberangan	√	√	√	√	Seksi TSDPP
					11.	Monitoring dan Pembahasan Andalalin	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
					12.	Pengawasan dan Penegakkan Hukum	√	√	√	√	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
					13.	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB	√	√	√	√	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					14.	Monitoring dan Pemantauan Fasilitas Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan di Provinsi Jambi	√	√	√	√	Seksi TSDPP

					15.	Inspeksi Keselamatan Angkutan Umum Penumpang Sungai, Danau dan Penyeberangan	√	√	√	√	Seksi TSDPP
5.	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat yang akuntabel	19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1.	Operasional dan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha
					2.	Belanja modal peralatan dan mesin	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha
					3.	Rehab gedung Kantor BPTD V Provinsi Jambi	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha
					4.	Pengadaan interior Kantor BPTD V Provinsi Jambi	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha
					5.	Belanja gaji dan tunjangan	√	√	√	√	Subbag Tata Usaha

Jambi, Januari 2021

Kepala Balai



Bahar, ST., MT

NIP. 19711007 199803 1 008

REVISI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana/ Penanggung jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	1. Presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	Persen	100	1. Subsidi operasional angkutan jalan	8,3	16,6	24,9	33,2	41,5	49,8	58,1	66,4	74,7	83	91,3	100	2.722.358.000	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	5	1. Angkutan perintis yang melayani terminal dan pelabuhan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4	1. Operasional Terminal Tipe A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8.157.663.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		4. Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Persen	100	1. Pengawasan Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	370.476.000	Seksi TSDPP

		6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	1. Pembangunan halte sungai	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	25.000.000	Seksi TSDPP
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	7. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	Persen	100	1. Operasional terminal penumpang tipe A - Terminal Alam Barajo - Terminal Sarolangun - Terminal Bangko - Terminal Bungo	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	8.157.663.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		8. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Persen	100	1. Operasional Satpel pengawas pelabuhan penyeberangan Kuala Tungkal	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	370.476.000	Seksi TSDPP
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70	1. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, Pengadaan dan Pemasangan ATCS di Kota Jambi, Bantuan teknis perlengkapan jalan pemenang WTN Provinsi Jambi,	5,8	10,16	15,96	21,76	27,56	33,36	39,16	44,96	50,76	56,56	62,36	70	22.527.367.000	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

[illegible]

		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	50	1.	Pengadaan alat kalibrasi uji berkala kendaraan bermotor	4,16	8,32	12,48	16,64	20,80	24,96	29,12	33,28	37,44	41,6	45,76	50	750.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	17. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85	1.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	2.275.515.000	Para Kasi dan Kasubbag
5.	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	18. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	1.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat dan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	85	23.571.285.000	Subbag Tata Usaha

Jambi, Agustus 2021
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi



Bahar, ST., MT
NIP. 19711007 199803 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BAHAR, ST, MT

Jabatan : KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, Januari 2021

Pihak Pertama,

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

NRP. 6205 0784

BAHAR, ST, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)
NIP. 19711007 199803 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	1. Presentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan	Persen	100
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	5
		3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4
		4. Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Persen	100
		6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	7. Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A	Persen	100
		8. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-
		9. Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP	Persen	100
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70
		11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Persen	2
		12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan di jalan nasional	Lokasi	38
		13. Jumlah ketersediaan taman edukasi	Lokasi	-

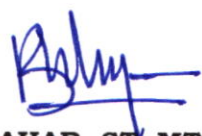
		14. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750
		15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-
		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	50
		17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Unit	50
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5.	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat yang akuntabel	19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

	Kegiatan	Anggaran
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 43.722.358.000,-
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 13.549.148.000,-
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 44.960.167.000,-
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 2.768.515.000,-
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 7.803.784.000,-
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 16.567.501.000,-

Pihak Kedua,

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si
NRP. 6205 0784

Jakarta, Januari 2021
Pihak Pertama,


BAHAR, ST, MT
Pembina Tk. I – (IV/b)
NIP. 19711007 199803 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HARWINANTO, SE, MT

Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BAHAR, ST, MT

Jabatan : KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

BAHAR, ST, MT

HARWINANTO, SE, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

Pembina – (IV/a)

NIP. 19711007 199803 1 008

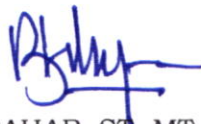
NIP. 19730313 199303 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	1. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
2.	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat yang akuntabel	2. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

	Kegiatan	Anggaran
1.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 1.025.000.000,-
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 7.803.784.000,-
3.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 16.567.501.000,-

Pihak Kedua,



BAHAR, ST, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19711007 199803 1 008

Jambi, Januari 2021

Pihak Pertama,



HARWINANTO, SE, MT

Pembina – (IV/a)

NIP. 19730313 199303 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YULIANA Y.S. PANJAITAN, S.SiT

Jabatan : KASI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BAHAR, ST, MT

Jabatan : KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BAHAR, ST, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19711007 199803 1 008

Jambi, Januari 2021

Pihak Pertama,

YULIANA Y.S. PANJAITAN, S.SiT

Penata Tk. I – (III/d)

NIP. 19790701 200112 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	1. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4
2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	2. Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A	Persen	80
		3. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	4. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-
		5. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	60

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 8.177.663.000,-
2.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 5.686.904.000,-
3.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 130.000.000,-

Pihak Kedua,



BAHAR, ST, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19711007 199803 1 008

Jambi, Januari 2021

Pihak Pertama,



YULIANA Y.S. PANJAITAN, S.SiT

Penata Tk. I – (III/d)

NIP. 19790701 200112 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FADJAR RIJADI, ST, MT

Jabatan : KASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BAHAR, ST, MT

Jabatan : KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

BAHAR, ST, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19711007 199803 1 008

FADJAR RIJADI, ST, MT

Penata Tk. I – (III/d)

NIP. 19711119 199903 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	1. Presentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan	Persen	100
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	5
		3. Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
2.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	4. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70
		5. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Persen	2
		6. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan di jalan nasional	Lokasi	38
		7. Jumlah ketersediaan taman edukasi	Lokasi	-
		8. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750

	Kegiatan	Anggaran
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 2.722.358.000,-
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 5.000.000.000,-
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 38.548.263.000,-
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 1.290.000.000,-

Pihak Kedua,



BAHAR, ST, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19711007 199803 1 008

Jambi, Januari 2021

Pihak Pertama,



FADJAR RIJADI, ST, MT

Penata Tk. I – (III/d)

NIP. 19711119 199903 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YULIANSYAH, S.SiT, MM

Jabatan : KASI TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN
PENYEBERANGAN PERINTIS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BAHAR, ST, MT

Jabatan : KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BAHAR, ST, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19711007 199803 1 008

Jambi, Januari 2021

Pihak Pertama,

YULIANSYAH, S.SiT, MM

Pembina – (IV/a)

NIP. 19800713 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi	1. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Persen	100
		2. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	3. Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP	Persen	100
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	4. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Unit	50

	Kegiatan	Anggaran
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 41.000.000.000,-
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 371.485.000,-
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 725.000.000,-
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 298.515.000,-

Pihak Kedua,



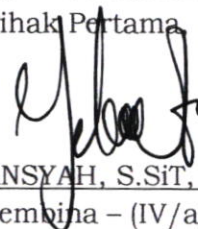
BAHAR, ST, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19711007 199803 1 008

Jambi, Januari 2021

Pihak Pertama,



YULIANSYAH, S.SiT, MM

Pembina – (IV/a)

NIP. 19800713 200112 1 002



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BAHAR, ST, MT

Jabatan : KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. Budi Setiyadi, SH, M.Si
NRP. 6205 0784

Bahar, ST, MT
Pembina Tk. I – (IV/b)
NIP. 19711007 199803 1 008

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	1. Presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	Persen	100
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	5
		3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4
		4. Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Persen	100
		6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	7. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	Persen	80
		8. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-
		9. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Persen	100
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70
		11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Persen	2
		12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	38

		13. Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		14. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750
		15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-
		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	60
		17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Unit	-
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5.	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat | Rp. 27.722.258.000,- |
| 2. | Pelayanan Transportasi Darat | Rp. 13.528.139.000,- |
| 3. | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat | Rp. 29.118.701.000,- |
| 4. | Penunjang Teknis Transportasi Darat | Rp. 2.275.515.000,- |
| 5. | Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp. 7.703.784.000,- |
| 6. | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat | Rp. 15.867.501.000,- |

Disetujui

Jakarta, Agustus 2021

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi,



Drs. Budi Setiyadi, SH, M.Si
NRP. 6205.0784



Bahar, ST, MT
Pembina Tk. I – (IV/b)
NIP. 19711007 199803 1 008



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BAHAR, ST, MT

Jabatan : KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. Budi Setiyadi, SH, M.Si
NRP. 6205 0784

Bahar, ST, MT
Pembina Tk. I – (IV/b)
NIP. 19711007 199803 1 008

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	1. Presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	Persen	100
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	5
		3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4
		4. Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Persen	100
		6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	7. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	Persen	80
		8. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-
		9. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Persen	100
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70
		11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Persen	2
		12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	38

		13. Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		14. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750
		15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-
		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	60
		17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Unit	-
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5.	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Kegiatan

Anggaran

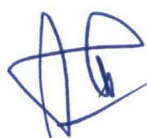
- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat | Rp. 27.722.258.000,- |
| 2. | Pelayanan Transportasi Darat | Rp. 13.528.139.000,- |
| 3. | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat | Rp. 29.118.701.000,- |
| 4. | Penunjang Teknis Transportasi Darat | Rp. 2.275.515.000,- |
| 5. | Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp. 7.703.784.000,- |
| 6. | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat | Rp. 15.867.501.000,- |

Disetujui

Jakarta, Agustus 2021

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi,



Drs. Budi Setiyadi, SH, M.Si
NRP. 6205 0784



Bahar, ST, MT
Pembina Tk. I – (IV/b)
NIP. 19711007 199803 1 008



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HARWINANTO, SE, MT

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BAHAR, ST, MT

Jabatan : KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bahar, ST, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19711007 199803 1 008

Jambi, Agustus 2021

Pihak Pertama,

Harwinanto, SE, MT

Pembina – (IV/a)

NIP. 19730313 199303 1 005

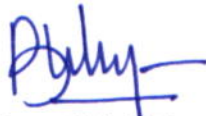
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	1. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
2.	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	2. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Disetujui

Jambi, Agustus 2021

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi,



Bahar, ST, MT
Pembina Tk. I – (IV/b)
NIP. 19711007 199803 1 008

Kepala Sub Bagian Tata Usaha,



Harwinanto, SE, MT
Pembina – (IV/a)
NIP. 19730313 199303 1 005



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YULIANA Y.S. PANJAITAN, S.SiT

Jabatan : KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA
TRANSPORTASI JALAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BAHAR, ST, MT

Jabatan : KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bahar, ST, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)
NIP. 19711007 199803 1 008

Jambi, Agustus 2021

Pihak Pertama,

Yuliana Y.S. Panjaitan, S.SiT

Penata Tk. I – (III/d)
NIP. 19790701 200112 2 005

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

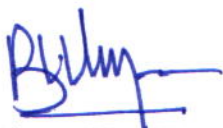
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	1. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	2. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	Persen	80
		3. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	4. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-
		5. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	60

Disetujui

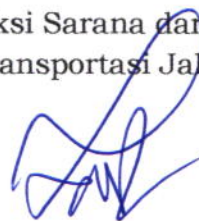
Jambi, Agustus 2021

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi,

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Transportasi Jalan,



Bahar, ST, MT
Pembina Tk. I – (IV/b)
NIP. 19711007 199803 1 008



Yuliana Y.S. Panjaitan, S.SiT
Penata Tk. I – (III/d)
NIP. 19790701 200112 2 005



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FADJAR RIJADI, ST, MT

Jabatan : KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BAHAR, ST, MT

Jabatan : KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Agustus 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Bahar, ST, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19711007 199803 1 008

Fadjar Rijadi, ST, MT

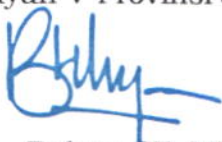
Penata Tk. I – (III/d)

NIP. 19711119 199903 1 003

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	1. Presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	Persen	100
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	5
		3. Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
2.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	4. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70
		5. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Persen	2
		6. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	38
		7. Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		8. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi,



Bahar, ST, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)
NIP. 19711007 199803 1 008

Jambi, Agustus 2021
Kepala Seksi Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan,



Fadjar Rijadi, ST, MT

Penata Tk. I – (III/d)
NIP. 19711119 199903 1 003



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YULIANSYAH, S.SiT, MM

Jabatan : KEPALA SEKSI TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN
PENYEBERANGAN PERINTIS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : BAHAR, ST, MT

Jabatan : KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Agustus 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Bahar, ST, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)

NIP. 19711007 199803 1 008

Yuliansyah, S.SiT, MM

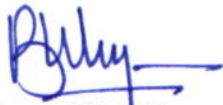
Pembina – (IV/a)

NIP. 19800713 200112 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

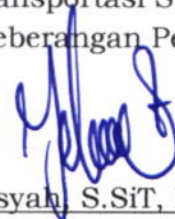
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	1. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Persen	100
		2. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2.	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	3. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Persen	100
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	4. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Unit	-

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi,



Bahar, ST, MT
Pembina Tk. I – (IV/b)
NIP. 19711007 199803 1 008

Jambi, Agustus 2021
Kepala Seksi Transportasi Sungai Danau
dan Penyeberangan Perintis,



Yuliansyah, S.SiT, MM
Pembina – (IV/a)
NIP. 19800713 200112 1 002



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **BAHAR, ST, MT**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**

WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. Budi Setiyadi, SH, M.Si

Bahar, ST, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)
NIP. 19711007 199803 1 008

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	1. Presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	Persen	100
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	5
		3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4
		4. Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Persen	100
		6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	7. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	Persen	80
		8. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-
		9. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Persen	100
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70
		11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Persen	2
		12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	38

		13. Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		14. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750
		15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-
		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	60
		17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Unit	-
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5.	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Kegiatan

Anggaran

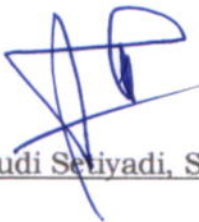
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat | Rp. 25.765.289.000,- |
| 2. Pelayanan Transportasi Darat | Rp. 16.622.939.000,- |
| 3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat | Rp. 31.000.850.000,- |
| 4. Penunjang Teknis Transportasi Darat | Rp. 2.275.515.000,- |
| 5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp. 8.433.774.000,- |
| 6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat | Rp. 15.667.501.000,- |

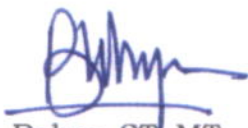
Disetujui

Jakarta, Desember 2021

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi,


Drs. Budi Setiyadi, SH, M.Si


Bahar, ST, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)
NIP. 19711007 199803 1 008